

# BIDIK

## NASIONAL

SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

## KPK CIDUK BUPATI PONOROGO

JAKARTA, BN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025). Informasi tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Jumat. "Benar," kata Fitroh. Fitroh mengatakan, dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan beberapa pihak, salah satunya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. "Sudah ditangkap," ujarnya.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko lahir di Ponorogo pada

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

# BPK UNGKAP KERUGIAN KEUANGAN KAB BLITAR

## □ Miliaran APBD Diduga Menguap, APH Diminta Tanggap

BLITAR, BN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023.

Temuan tersebut tersaji dalam Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan nomor 65.B/LHP/XVIII,SBY tertanggal 30 April 2024

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



## Pengadaan Climbing Wall Speed Rp 601 Juta Disporapar Jombang Slintutan

### □ Kadisporapar Bambang : Jangan Ditulis Mas



Bambang Nurwijanto, Kepala Disporapar Jombang. (istimewa)

JOMBANG, BN - Pengadaan barang "Climbing Wall Speed" (Bangunan panjat tebing) patut disorot. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang dijabat oleh Bambang Nurwijanto adalah kepala dinas Disporapar (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata) Jombang. Selain itu dia sangat pelit bicara ketika dikonfirmasi Bidik Nasional (BN).

Ini sama halnya telah melanggar Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Berdasarkan Pasal 51 UU KIP, pejabat publik bisa diancam penjara satu tahun dan denda Rp 5 juta apabila menghambat atau menolak memberikan informasi.

Keterangan dihimpun BN, pada pengadaan barang tersebut patut di curigai ada



Ilustrasi: Climbing (panjat tebing)

permainan kotor, apalagi pada anggaran untuk pengadaan tersebut menggunakan uang negara hasil dari keringat rakyat. Perlu

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

## Realisasi Dana Desa Wunut Porong Dipertanyakan



ilustrasi

SIDOARJO, BN - Penggunaan Dana Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dipertanyakan. Temuan kejanggalan yang mengarah pada indikasi penyimpangan terkesan di abaikan tanpa penjelasan?

Berdasarkan informasi, data dan/ atau dokumen yang di terima Redaksi BIDIK NASIONAL, Pemerintah Desa Wunut Kecamatan Porong Kab Sidoarjo Tahun 2023 mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.211.103.000 yang dilaksanakan tiga tahap. Dengan rincian:

Tahap 1 sebesar Rp.447.438.300 atau 36,94% Tahap 2 sebesar Rp.321.438.300 atau 26,54% dan Tahap 3 sebesar Rp.442.226.400 atau 36,51% total realisasi Rp.1.211.103.000 atau 100%.

Anggaran tersebut digunakan Pemerintah Desa Wunut untuk membiayai 12 kegiatan dengan nilai realisasi penggunaan seluruhnya sebesar Rp.1.094.972.710 atau terdapat sisa lebih penerimaan atas penggunaan Dana Desa Wunut sebesar Rp.116.130.290

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

## TK Tarbiyatul Wathon Campurejo Gresik Lakukan Pengenalan Profesi Nelayan dan Hasil Tangkapan Laut



Anak-anak TK Tarbiyatul Wathon Campurejo Gresik saat melakukan pengenalan profesi nelayan dan hasil tangkapan laut di Instalasi Pelabuhan Perikanan Pantai (IPPP) Campurejo. (ist)

PPP BULU, BN - Suasana riang tampak di Instalasi Pelabuhan Perikanan Pantai (IPPP) Campurejo pagi ini. Puluhan anak dari TK Tarbiyatul Wathon, Campurejo Gresik melakukan kegiatan kunjungan kurikulum mendalam dengan tema "Pengenalan Profesi Nelayan dan Hasil Tangkapan Laut".

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan secara langsung kepada peserta didik tentang profesi nelayan, hasil tangkapan laut, serta pentingnya menjaga kelestarian laut. Anak-anak terlihat antusias saat menyaksikan kapal nelayan sandar di dermaga dan hasil tangkapan ikan dari nelayan. Selain itu, peserta didik juga bergantian menaiki kapal hal tersebut memberikan pemahaman secara langsung kepada peserta didik mengenai alat transportasi nelayan

Guru pendamping TK Tarbiyatul Wathon menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran tematik agar anak mengenal lingkungan sosial dan profesi di sekitar mereka.

"Melalui pengalaman langsung seperti ini, anak-anak dapat belajar dengan cara yang menyenangkan. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat dan merasakan sendiri aktivitas nelayan," ujar salah satu guru pendamping.

Pihak IPPP Campurejo menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap kunjungan seperti ini dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap laut dan profesi nelayan sejak dini.

"Kami terbuka untuk kegiatan edukatif seperti ini. Harapannya, anak-anak semakin menghargai hasil laut dan memahami pentingnya menjaga ekosistem pesisir," tutur pengelola IPPP Campurejo.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama. Dengan kunjungan ini, diharapkan tumbuh semangat cinta laut dan rasa hormat terhadap profesi nelayan di hati anak-anak. (Adv/PPP Bulu)

## Dugaan Pungli dan Pengalihan Bantuan Alsintan di Dinas Pertanian Subang Patut Diusut

SUBANG, BN - Hingga akhir Oktober 2025, Dinas Pertanian Kabupaten Subang belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pungutan liar (pungli) dan pengalihan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang bersumber dari program pemerintah pusat tahun anggaran 2022 dan 2025.

Sebelumnya, Media Bidik Nasional (BN) melalui surat konfirmasi resmi Nomor: 019/SK/BN/X/2025, tertanggal 13 Oktober 2025, telah menyampaikan permintaan klarifikasi kepada pejabat terkait di Dinas Pertanian Subang. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban ataupun tanggapan resmi.

Upaya konfirmasi juga dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada Plt. Kepala Dinas Pertanian Subang, Bambang Suhendar, dan Kabid Tanaman Pangan, Sulaeman Sidik, namun belum mendapat respons. Padahal, klarifikasi tersebut penting demi asas transparansi publik dan keseimbangan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Sulaeman Sidik, Kabid Tanaman pangan Subang Jawa Barat.



## Dugaan Pungli Berkedok Kartu Ujian di SMAN 1 Kauman Tulungagung, Resahkan Murid

### □ Kasek Agus Sugiarto : Sumbangan Bersifat Sukarela

TULUNGAGUNG, BN - Sebuah video yang memperlihatkan keluhan seorang siswi SMA Negeri 1 Kauman, Tulungagung, terkait kewajiban pembayaran sumbangan bulanan sebesar Rp100 ribu sebelum pengambilan kartu ujian, viral di media sosial pada Jumat (31/10).

Seorang siswi kelas X yang memperkenalkan diri bernama Beby, mengaku keberatan atas penarikan sumbangan tersebut. Dia menjelaskan tidak dapat mengambil kartu ujian karena belum melunasi sumbangan yang disebutkan harus dibayar sejak awal masuk sekolah.

"Kan bulan depan mau ada ujian, terus disuruh ambil kartu ujiannya di ruang komite. Tapi katanya kartu ujian tidak bisa diambil kalau belum melunasi uang sumbangan per bulan Rp100 ribu. Saya masuk bulan Juli, berarti harus melunasi Rp 600 ribu. Banyak teman-teman yang keberatan, apalagi yang ekonominya rendah," ujar Beby dalam rekaman tersebut.

la juga menyebut, sejumlah wali murid merasa tidak pernah

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Agus Sugiarto Kepala SMAN 1 Kauman Tulungagung

## LOWONGAN WARTAWAN

Koran BIDIK NASIONAL Membutuhkan Wartawan yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Peminat bisa kirim lamaran ke Jl. Ikan Lele 2/Ci14 Bluru Permai, Bluru Kidul, Sidoarjo atau Hubungi Bos EDY (HP/WA: 08123209649) email : bidiknasional@yahoo.com

## Bupati Subandi Bantah Isu Tim Mabes Polri Datangi Pendopo Sidoarjo: Itu Hoaks!



Bupati Sidoarjo, H. Subandi. (Foto: ist)

SIDOARJO, BN – Bupati Sidoarjo H. Subandi, membantah keras kabar yang beredar di media sosial mengenai kedatangan tim dari Mabes Polri ke Pendopo Kabupaten Sidoarjo pada Rabu malam (5/11/2025). Ia menegaskan, informasi tersebut tidak benar alias hoaks.

Menurut Subandi, kabar yang menyebut adanya pemeriksaan atau pengeledahan di Pendopo sama sekali tidak berdasar. “Tidak benar

berita tersebut yang mengatakan Tim Mabes Polri Datangi Pendopo hingga larut malam,” tegasnya kepada sejumlah wartawan, Kamis (6/11/2025).

Subandi menjelaskan, pada malam yang disebut dalam kabar itu, dirinya justru sedang menikmati waktu santai di Pendopo bersama beberapa pejabat daerah.

“Tadi malam saya ngopi bareng Pak Kapolresta, Dandim lama, dan Pak Yanto

dari Bank Jatim. Tidak benar itu, tidak ada pengeledahan di Pendopo,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan santai tersebut berlangsung dalam suasana akrab. Bahkan Letkol Inf. Dedyk Wahyu Widodo, eks Dandim Sidoarjo, hadir di sana setelah sebelumnya mendampingi Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam agenda di wilayah Jawa Timur.

“Ngopi bareng itu biasa, bukan hal luar biasa. Tapi pagi harinya saya malah kaget baca kabar seolah-olah Pendopo diperiksa Mabes Polri. Jelas itu kabar bohong,” kata Subandi.

Ia menegaskan, tidak ada aktivitas apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan aparat kepolisian di lingkungan Pendopo Kabupaten.

“Kita bangun tidur terus dapat kabar Pendopo diperiksa. Tidak benar itu, sekali lagi hoaks,” tegasnya.

Subandi mengaku prihatin dengan maraknya penyebaran informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, penyebaran berita bohong seperti itu bisa menimbulkan keresahan publik dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Kita ini sebagai pimpinan daerah, tugasnya melayani masyarakat. Kalau setiap hal diributkan dengan informasi yang tidak benar, ya masyarakat jadi bingung,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para penyebar berita agar tetap berpegang pada kode etik jurnalistik, termasuk prinsip check and recheck sebelum menayangkan informasi ke publik.

“Kemarin ada mutasi saja diributkan, sekarang muncul lagi berita hoaks. Jelas ini tidak sesuai kaidah jurnalistik,” ungkapnya.

(Teddy Syah)

## Pemkab Sidoarjo Gelar Pilkades Serentak 2026 di 80 Desa



SIDOARJO, BN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2026. Sebanyak 80 desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

Penetapan tersebut tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Zaidar Rasepta, dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo.

Dalam kesepakatan Pilkades serentak nanti, tahapan pelaksanaan Pilkades dimulai dengan masa persiapan pada 1 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026. Tahapan pencalonan berlangsung pada 14 Januari hingga 23 April 2026, disusul pelaksanaan pemungutan suara pada 24 Mei 2026. Sementara itu, tahap penetapan hasil Pilkades dijadwalkan pada 24 Mei hingga 29 Juni 2026.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa Pemkab bersama Forkopimda berkomitmen menjaga pelaksanaan Pilkades agar berjalan aman dan lancar.

“Kami ingin Pilkades 2026 ini menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat dan damai. Pemerintah daerah bersama Forkopimda siap memastikan setiap tahapan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel,” kata bupati saat memberikan arahan pada rapat Pilkades Tahun 2026 di Opsroom Setda Kab. Sidoarjo pada Senin (3/11/2026).

Bupati juga menambahkan bahwa sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas daerah selama proses pemilihan. “Pilkades bukan sekadar ajang memilih pemimpin desa, tetapi momentum memperkuat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Sidoarjo dari tingkat desa,” lanjutnya.

Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol. Christian Tobing memastikan seluruh tahapan Pilkades 2026 akan berlangsung kondusif dengan menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat. “Kami siap melakukan pengamanan pada saat Pilkades serentak tahun 2026 mendatang,” ungkapnya.

Selain itu, dalam hal terdapat desa dengan hanya satu calon kepala desa, pelaksanaan Pilkades serentak di desa tersebut akan ditunda hingga terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (yah)

## Pererat Solidaritas, Dan SSK TMMD ke-126 Anjongsana Bersama Anggota Satgas

SIDOARJO, BN – Kodim 0816 satgas TMMD ke-126 dalam rangka mempererat hubungan antara Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 dengan masyarakat di lokasi sasaran, Komandan Satuan Setingkat Kompi (DAN SSK) TMMD ke-126 Letda Inf M. Rafly Fatoni bersama anggota Satgas melaksanakan kegiatan anjongsana ke rumah warga di Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (1/11/2025).



Eks Pj Bupati Sidoarjo Hudiono 2020-2021 (kiri), Win Hendarso 2000-2010 (tengah) dan Ahmad Muhaldor 2021-2024 (kanan). (Foto: ist)

Kegiatan anjongsana ini menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam suasana penuh keakraban, DAN SSK beserta anggota berinteraksi langsung dengan warga, mendengarkan aspirasi serta berbagi cerita tentang pelaksanaan kegiatan TMMD yang tengah berjalan di desa tersebut.

Letda Inf M. Rafly Fatoni menyampaikan bahwa kegiatan anjongsana ini merupakan bagian penting dari program nonfisik TMMD. “Melalui anjongsana seperti ini, kami

ingin memperkuat tali silaturahmi dan kebersamaan dengan masyarakat, sekaligus memastikan kehadiran TNI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujarnya.

Selain menjalin keakraban, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, pentingnya gotong royong, serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Warga Desa Kedondong menyambut baik kunjungan tersebut. Mereka merasa senang dan bangga karena TNI tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan hubungan sosial dengan masyarakat.

Melalui kegiatan anjongsana ini, diharapkan sinergi antara Satgas TMMD dan masyarakat semakin kuat, sehingga seluruh program TMMD ke-126 Kodim 0816/Sidoarjo dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan desa.

(yah)

## Rapat Forkopimda Sidoarjo, Bahas Pembukaan Jalan Mutiara Regency dan Mutiara City



Forkopimda Sidoarjo saat rapat di Pendopo Delta Wibawa.

SIDOARJO, BN – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat koordinasi membahas persoalan pembukaan akses jalan antara Perumahan Mutiara Regency dan Mutiara City yang berlokasi di wilayah Desa Banjarbendo dan Desa Jati, Kec. Sidoarjo.

Rapat yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, itu dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo dan dihadiri Dandim 0816, Kapolresta Sidoarjo, perwakilan Kejari Sidoarjo, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Audiensi ini digelar sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait tertutupnya akses jalan penghubung antarperumahan yang berdampak pada mobilitas warga dan kegiatan sosial di wilayah tersebut.

Dalam rapat tersebut, Kapolresta Sidoarjo menyampaikan bahwa pihak kepolisian siap mendukung keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah bersama seluruh pihak.

“Kami pada prinsipnya akan men-support apa yang diputuskan. Yang penting semua pihak saling berkomunikasi dan mencari jalan tengah agar persoalan ini selesai dengan baik,” ujarnya, Selasa (04/11/2025).

Kapolres juga menekankan pentingnya win-win solution dan penerapan restorative justice dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Sedangkan, Dandim 0816 memandang persoalan akses jalan ini tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek religius, sosial, ekonomi, dan pertahanan. “Kalau kita melihat dari sisi agama, siapa yang menutup jalan orang lain maka rezeki dan silaturahmi juga akan terputus. Kita diperintahkan untuk menjalin, bukan memutus tali silaturahmi,” terangnya.

Setelah mendengarkan seluruh pandangan dari pihak kepolisian, TNI, masyarakat, dan perwakilan desa, Bupati Sidoarjo menegaskan bahwa keputusan pemerintah daerah akan berlandaskan hukum dan kemaslahatan masyarakat. “Konektivitas adalah hal utama, kemaslahatan umat juga menjadi prioritas. Saya minta Dinas Perhubungan Provinsi segera membuat kajian Andalalin tanpa menunggu persetujuan tambahan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut Pimpinan rapat yang merupakan Forkopimda sepakat jalan akses untuk dibuka. Bupati juga meminta pihak warga Mutiara Regency menghadirkan tenaga ahli untuk menjelaskan mengenai alasan teknis terkait penolakan konektivitas jalan tersebut.

“Kami ingin tahu alasan penolakan tersebut secara jelas sebelum keputusan final diambil,” ungkapnya. Sebagai penutup, Bupati mengugaskan Kepala Dinas Permukiman Kabupaten Sidoarjo, Bahruni, untuk segera menjadwalkan tindak lanjut rapat lanjutan pekan depan. (Teddy Syah)

## Penyerapan Dana Desa Kebonwaris Rp 734 Juta, Janggal



PASURUAN, BN – Kapabilitas dan pemahaman Aparatur Pemerintah Desa Kebonwaris Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) sebagai dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dipertanyakan.

Tak hanya itu, rendahnya penyerapan Dana Desa Kebonwaris Tahun 2024, memberi pelajaran penting peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengendalian intern pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi, data dan/atau dokumen yang di terima Redaksi BIDIK NASIONAL, Pemerintah Desa Kebonwaris

Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.012.411.000 yang disalurkan dua tahap. Dengan rincian:

Tahap 1 sebesar Rp.514.700.400 atau 70,11% Tahap 2 sebesar Rp.219.472.000 atau 29,89% dari realisasi penggunaan Dana Desa sebesar Rp.734.172.400 atau 72,05% dari pagu penyaluran sebesar Rp.1.012.411.000

Anggaran tersebut digunakan Pemerintah Desa Kebonwaris untuk mendanai 26 kegiatan dengan nilai realisasi penggunaan seluruhnya sebesar Rp.399.813.912 terdapat sisa lebih penyerapan atas penggunaan Dana Desa Kebonwaris sebesar

■ Bersambung ke hal.4 kol.5

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

**BIDIK**  
NASIONAL

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB : Edy Sutanto. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Teddy Syah Roni. PENASEHAT HUKUM : Yustinus Haryanto, SH. REDAKTUR PELAKSANA : Budi Santoso. REDAKTUR : A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhsan, Agus. TIM LIPUTAN KHUSUS : Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto, Suwoto. JAWA TIMUR : SURABAYA : Dymas Ma'rufi Santoso, Abd Rossi, Ninik Rachmawati. SIDOARJO: Nur Yahya. GRESIK : Ariadi AM, Subkan Arif. PAMEKASAN : Ainur Halis. SUMENEP : Adi Yusman, Ishak. SAMPANG : Hollilurohman. MOJOKERTO : Husnan. JOMBANG : Totok Agus Hariyanto (Kabiro), Devi Setyorini. NGANJUK : Agung Moch. Suhada, Sugianto, Dodik Andiyanto. KEDIRI : Nyoto Dharmawan. TULUNGAGUNG/ TRENGGALOK : Nik Atin. MADIUN: Basuki. NGAWI : Leo Lunardi T. MAGETAN : Ashar AR. PONOROGO : Andhy Wijaya. LAMONGAN : Syaiful Anam, Sulistiowati, Arif Mustofa, Joko Santoso. BOJONEGRO :

Priyanto. MALANG RAYA : Nino Wiwantara. BLITAR : Budi Sastro. PASURUAN : Toddy Pras Hendarto, PROBOLINGGO/LUMAJANG : Sonny Narwani. JEMBER : Agus Budiono. SITUBONDI : Agung Cholmelis (Kabiro), Hari Sulisty. BONDOWOSO : Rukwandana. BANYUWANGI : Djoni DW (Kabiro), Suropto, Sugeng Purnomo. JAWA TENGAH : BLORA : Mugianto (Kabiro), Tiono Indah Handayani, Ali Mustofa, Nurcahyanto. REMBANG : Didik Eko Sulistiawan. WONOGIRI : Heryanto. SEMARANG RAYA : Beni Kusumawati (Kabiro), Catur Prasetyo. PEKALONGAN RAYA : Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. BATANG : Rudiono (Kabiro), Bambang Hadi. KENDAL : Peni Kusumawati, Doni Kurniawan. KUDUS : Budi Setiawan. GROBOGAN : Heru Budianto. SALATIGA : Susilo Haryadi. BOYOLALI : Ahmad Mukhlis (Kabiro). TEMANGGUNG : Novan Argunanto. JAWA BARAT : CILACAP : Eko Prionggo Dewo, Suyatno. MAGELANG : Marno, ST. BANDUNG : Zaenal Ikhsan (Kabiro). CIAMIS/KOTA BANJAR/PANGANDARAN : Asep Sujana, Karsono. SUMEDANG : Ernawan Hidayat. SUBANG : Tohir (Kabiro), Sumantri, Anay, Kandiawan, Ahmad Saehu. INDRAMAYU : Candra Shema Restullah (Kabiro), Ragil Pangestu. DEPOK : Harahap (Kabiro), Fajar. BEKASI : Abdul Rachman. KUNINGAN : Edwar Panata Muda. PURWAKARTA : Anthon Pontoh, Endin. BOGOR : Liswandi (Kabiro), Wardiyansyah Saputra, Firdaus. JAKARTA/BANTEN : Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. BALI : Agung Wiarto. SULAWESI SELATAN : SOPPENG/WAJO : Anwar Paturusi (Kabiro). PINRANG : Moh Sabir (Kabiro), Subhan Hapid. BONE : Edy Suspi AB. SULAWESI UTARA : Hilda Pusung. MANADO : Affandi Masloman. KOTAMOBAGU/BMR : Arman Muna (Kabiro), Moh Setio Wanoto. GORONTALO : Rifly Tama'un. SULAWESI BARAT : Andi Firmansyah. HALMAHERA SELATAN : Anwar Suleman. KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA : Effendi (Kabiro). KALIMANTAN BARAT : Sofyan Hadi. KETAPANG : Sukarto. KALIMANTAN UTARA : Syamsudin (Kabiro). KEPRI : BENGKALIS : Agung Mulyono. KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN : Handoko KEP NATUNA : Amir Hamzah. RIAU : Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). SUMATERA SELATAN : PALEMBANG : Sirlani. LAHAT/MUARA ENIM : Adi Nurahman. PAGAR ALAM : Marleo Tanjung. OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN : M Azhary MY, OKU TIMUR : Nelis Sri Wahyuni. OKI : Nurli Oktari. SUMATERA UTARA. KOTA MEDAN : Muhammad Syaefi Harahap. LABUHANBATU : M. Sukma (Kabiro). PAKPAK BHARAT : Tennang Tumangger (Kabiro), Dariono. DELI SERDANG : Heri Siswoyo. ASAHAN : Tumin P, Sandro Natanael Hulu, Hengky Arnes, Faoziduhu Hulu. NIAS UTARA : Hadirat Syukur Harefa. NIAS BARAT : Odaligo Zai. TAPANULI SELATAN : Amir Hamzah Nasution SUMATERA BARAT : PASAMAN : Suryadarma (Kabiro), Refidinal. LAMPUNG : WAY KANAN : Arye M Jahri. LAMPUNG TIMUR : Nuhyin, Mueshin, Antoni. LAMPUNG UTARA : Eka Saputra (Kabiro), Triyutika Sari LAMPUNG SELATAN: Muhammad Fahrza Khibran Wibowo. LAMPUNG BARAT / PESISIR BARAT : M. Taufik TULANG BAWANG/TULANG BAWANG BARAT : Indra Wijaya, Hendra Jaya. PRINGSEWU : Iskandar. B. BANDAR LAMPUNG : Suhartono Hariwibowo. TANGGAMUS : - NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES : Sutrisno (Kabiro), Simson Sitepu. SUBULUSSALAM : Agus Darminto Bancin (Kabiro), Imran Cibro. ACEH SINGKIL : Roni Syehrani (Kabiro), Nurhalimah. BIREUM : Hendra S. BANGKA BELITUNG : Agusman Sirait (Kabiro), Tamrin. JAMBI, TANJUNG JABUNG BARAT: Joni Efendi. TEBO : Wendri Putra Rezky. NUSA TENGGARA BARAT : MATARAM: Hidayatul Aini (Kabiro). PAPUA : Junjungan Silalahi. LAYOUT/IT Nur Hayati PEMASARAN/ADMINISTRASI/KEUANGAN: Dita Zahra Amalia. PENERBIT : PT Bidik Nasional Pers (BNP). AKTE NOTARIS : LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014. SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015. AKTE NOTARIS PERUBAHAN : Iwan Saleh Irawan, SH, No 02 Tgl 4 Februari 2020. SK MENKUMHAM PERUBAHAN : No AHU-0010003.AH.01.02. Tahun 2020 NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BERBASIS RESIKO: 0220105231819. NPWP: 72.007.891.4-617.000. ALAMAT : Jl. Ikan Lele 2 Blok Ci No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. JAKARTA : Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Telp. 021-53661085. BANK: Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01-002254-30-8/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 AN PT Bidik Nasional Pers. WEBSITE : https://bidiknasional.com.Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya, Jl. Brigjen Katamso No. 45 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Penganal, Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik PENGADUAN HOT LINE : 08123209649, 087748103562, 031-99728729. Email: bidiknasional@yahoo.com/ bidiknasional1@gmail.com/bidiknasional2@gmail.com

SEGALA PUBLIKASI YANG DITERBITKAN DI MEDIA INI MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB REDAKSI

## Terkait Ambrolnya Jalan Asem Gede Ngusik'an, Dewan Jombang Desak Minta PUPR Evaluasi Menyeluruh

JOMBANG, BN - Terkait ambrolnya jalan cor beton di Desa Asemgede, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, DPRD Jombang diduga cari panggung "Kebakaran jenggol" seakan sebagai pahlawan kesenangan. Muncul tiba-tiba ketika proyek Desa Asem gede rusak (ambrol). Dewan menilai, bahwa proyek jalan yang baru berumur dua tahun itu tidak seharusnya rusak parah jika perencanaan dan pengerjaannya dilakukan ada indikasi tidak sesuai spesifikasi (spek).



Jalan Asem Gede Ngusik'an yang ambrol. (Foto: Tok)

Dewan Jombang mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek jalan cor beton di desa tersebut. Menurut Ketua DPRD Jombang, "Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Harus ditelusuri apakah ada kesalahan dalam perencanaan atau pelaksanaan proyek," ujar Hadi Atmaji, Jumat 24 Oktober 2025.

Ketua Dewan tersebut juga meminta agar Dinas PUPR Jombang segera melakukan penanganan darurat supaya akses masyarakat tidak terputus. Menurutnya, perbaikan sementara harus segera dilakukan agar mobilitas warga tetap lancar, tidak ada kendala.

Salah satu anggota Komisi C DPRD Jombang, Syaifulloh, menilai ambrolnya jalan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan kualitas konstruksi.

Menurutnya, "supaya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan kualitas konstruksi jalan itu, karena proyek ini baru dikerjakan tahun 2023. Sebelumnya, jalan ini juga pernah mengalami kerusakan serupa," pungkasnya.

Selain itu, Syaifulloh menekankan pentingnya memperhatikan aspek teknis seperti drainase, struktur tanah, dan daya tahan terhadap curah hujan tinggi dalam setiap pem-

angunan jalan di Kabupaten Jombang," ujar Syaifulloh yang juga berprofesi sebagai kontraktor

"Kami mengingatkan agar dalam setiap pembangunan, aspek teknis benar-benar diperhitungkan dan direncanakan dengan teliti oleh konsultan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali," ujarnya.

Untuk itu Komisi C DPRD Jombang akan segera melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan proses perbaikan berjalan sesuai standar teknis dan tepat waktu.

"Ini sangat merugikan masyarakat. Jalan itu satu-satunya jalur utama aktivitas ekonomi dan sosial warga," ungkap salah satu anggota dewan yang juga berprofesi sebagai kontraktor dan sangat vokal ini.

Pertanyaannya ada apa dengan salah satu anggota dewan ini yang kelihatan nya ngotot memojokkan OPD yang terkait penanganan proyek tersebut?

Sementara Ketua LP3/LSM Sapujagad Rachman Alim menyampaikan Pendapatnya bahwa "Kejadian tanah longsor yang mengakibatkan rusaknya sebagian badan jalan di wilayah Desa Asem gede adalah murni bencana alam jadi tak elok kalau peristiwa tersebut di manfaatkan sebagai ajang untuk cari panggung oleh pihak pihak lain, lebih-lebih oleh anggota DPRD Jombang yang mengaitkan peristiwa bencana tersebut dengan proyek-proyek sebelumnya (Tahun 2023). Kalau DPRD memperlakukan proyek-proyek sebelumnya apalagi itu proyek tahun 2023, ini kan ibarat menampar muka sendiri, dimana fungsi pengawasan DPRD di masa itu?" ujar Rachman Alim.

"Secara pribadi, saya menilai kinerja OPD/SKPD pemerintah kabupaten Jombang sudah cukup maksimal, meskipun ada beberapa hal yang perlu kita kritisi" ungkap Ketua LSM Sapujagad. (Tok)

## Ketua LP3 Sapujagad : Tunjangan DPRD Jombang Terlalu Berlebihan, Cederai Rasa Keadilan

JOMBANG, BN - Masyarakat kota santri banyak yang menilai bahwa dengan tunjangan DPRD Jombang, tidak masuk akal. Tunjangan tersebut cuma buat alasan, terkait dengan di berikan nya tunjangan setiap anggota DPRD Jombang. Mungkin tujuannya agar tidak ada korupsi yang nanti dilakukan oleh anggota dewan, tetapi itu hanya merupakan alasan klasik yang tidak bisa dijadikan jaminan, itu tidak masuk akal.

Keterangan dihimpun bidiknasional.com (bn.com), masih banyak anggota DPRD di Indonesia ini sudah mendapatkan gaji yang cukup lumayan besar, fasilitas dan tunjangan, masih banyak yang tersangkut korupsi.

Instrumen gaji dan tunjangan tidak bisa menjadi garansi mereka tidak akan korupsi. Banyak faktor yang menjadi sebab tidak hanya soal gaji dan tunjangan saja, memang kesejahteraan para anggota dewan sangat penting untuk menghindari praktik korupsi, tetapi itu bukan jaminan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Rachman Alim, Ketua LP3 Sapujagad yang secara langsung mewakili masya-



Rachman Alim, Ketua LP3 Sapujagad (Foto: istimewa)

rakat Jombang, merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada DPRD Jombang saat ini, dan Pemerintah Kabupaten Jombang yang tidak melakukan penghematan pada anggaran. Untuk Rachman Alim meminta kepada Bupati, dan Ketua DPRD Jombang serta Gubernur Jawa timur untuk mengevaluasi Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Jombang.

Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) No 66 Tahun 2024 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

Selain itu, dalam Perbup tersebut pada Pasal 11 berbunyi: (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah



Hadi Atmaji, Ketua DPRD Jombang. (ist)

negara dan perlengkapannya bagi Ketua DPRD, dan kendaraan perorangan dinas bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua DPRD sebesar Rp.37.945.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.26.623.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan; dan

c. Anggota DPRD sebesar Rp.18.865.000,00 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas bagi Anggota DPRD, diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025

Masih menurut ketua LP3 sapujagad ini, anggaran tersebut dinilai terlalu berlebihan dan mencederai rasa keadilan sehingga harus dievaluasi. "Saya sudah terjun berkeliling dari pasar ke pasar, dari warung ke warung, dari jalan ke jalan, kondisi perekonomian masyarakat Jombang sedang memburuk, pendapatannya lagi seret, saya sudah bertanya mulai dari penjual sayur di pasar maupun di pinggir jalan, pedagang keliling mulai dari bakul pentol, bakul roti sampai bakul tahu bulat dan warung warung kopi, serta para pedagang kaki lima. Intinya semua mengeluh pendapatan nya minim dan kadang tidak cukup untuk

■ Bersambung ke hal.10 kol.1

## DPRD Pamekasan Gelar Sidang Paripurna Hari Jadi Pamekasan Ke-495 Tahun 2025

PAMEKASAN, BN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pamekasan menggelar sidang paripurna peringatan hari jadi Pamekasan ke-495 tahun 2025 dengan tema "Pamekasan Kreatif dan Maju" yang bertempat di aula sidang pertemuan DPRD kabupaten Pamekasan. Senin, 03/11/2025.

Sidang paripurna kali ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur yang dihadiri oleh segenap anggota DPRD Pamekasan. Nampak hadir pula bupati Pamekasan Dr Kholilurrahman SH, Msi dan wakil bupati Sukriyanto, sekda Masrukin S.Sos, Msi juga ketua Pengadilan, Kajari serta Kapolres AKBP Hendra Eko Yulianto S.I.K dan



Dandim 0826 Letkol kav. Agus Wibowo Hendratmiko SH juga seluruh pimpinan OPD se-kabupaten Pamekasan

Pada sidang paripurna dalam rangka memperingati hari jadi Pamekasan ke-495 tahun 2025 dengan menggunakan dialek bahasa madura sebagai bentuk menunjukkan jati diri sebagai bahasa adat Madura.

Menurut ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyampaikan dengan momentum hari jadi Pamekasan ke-495 tahun 2025 ini, patut kiranya kita semua wajib bersyukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dapat berkumpul

■ Bersambung ke hal.10 kol.1

## Gedung Go Skate Embong Malang Sarang Pungli Berkedok Parkir



Bukti karcis yang dikeluarkan manajemen Go Skate dan yang dikeluarkan manajemen diskotek Paradise. (rosi)

SURABAYA, BN - Gedung Go Skate di Jalan Tunjungan Surabaya, disebut-sebut sebagai sarang pungli berkedok parkir. Pasalnya, Gedung yang ditempati Diskotek 'Paradise' tersebut, menerapkan biaya penarikan parkir sebanyak dua kali.

Seperti dalam penelusuran wartawan koran ini, pada Rabu dinihari (29/10/2025), dari pihak pengelola parkir di pintu masuk Gedung Go Skate, telah menarik biaya parkir kepada para pengendara sepeda motor sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Namun, setelah parkir di area depan Diskotek 'Paradise' penagihan biaya parkir sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), kembali dibebankan kepada para pengendara sepeda motor dengan bukti karcis yang berbeda bergambar 'Paradise Club'.

Anehnya, meski secara terang-terangan dari pihak resmi pengelola lahan parkir di Gedung Go Skate Surabaya, mengetahui adanya aktifitas penarikan biaya parkir kembali di gedung tersebut, terlihat adanya dugaan pembarian.

"Iya, mas... diatas juga ada biaya penarikan parkir. Namun, saya tidak tau siapa yang menarik kembali biaya parkir," cetus pengelola parkir resmi di pintu keluar Gedung Go Skate Surabaya.

Sementara itu, salah satu pengunjung 'Paradise' saat dimintai biaya penarikan parkir kembali di Gedung Go Skate Surabaya, berharap agar dari pihak pengelola Gedung tersebut, melakukan tindakan tegas karena merugikan nama baik pengelola Go Skate.

"Harapan saya, agar ada penegasan saja dari pihak pengelola Gedung Go Skate Surabaya, bahwa di Gedung ini, masih saja ada biaya penarikan parkir lagi sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Kalau biaya penarikan parkir untuk mobil mungkin mahal," tuturnya.

Hingga berita ini dipublikasikan ke media massa, wartawan koran Bidik Nasional, belum mendapat keterangan resmi dari pihak pengelola Gedung Go Skate Surabaya, maupun pihak Diskotek 'Paradise' yang berada di wilayah hukum Polsek Tegalsari Polrestabes Surabaya. (Abd. Rosi)

## Satpam Outsourcing Dinas PUPR Jombang Bikin Tak Nyaman



Dinas PUPR Jombang (istimewa)

JOMBANG, BN - Menyoroti sikap Satpam Outsourcing di Dinas PUPR Jombang, banyak keluhan terutama pada Wartawan yang datang ke kantor Dinas PUPR Pemkab Jombang tersebut. Sebenarnya tugas yang diemban sudah cukup bagus dan menun-

jukkan disiplin kerja yang cukup. Tetapi apa yang dijalankan tugasnya ada beberapa sikap yang kurang simpati, dan sok arogan.

Beberapa hari lalu (28/10/2025) kurang lebih pukul 09.00 wib, ada seorang wartawan masuk lewat pintu samping, karena baru dari toilet kamar mandi, ada pintu samping terbuka. Buru-buru masuk lewat pintu samping, satpam menghadang disuruh masuk pintu depan. Rasa menghargai dan mungkin dianggap salah, wartawan tersebut manut (patuh) lewat pintu depan. Setelah masuk dari menghadap salah satu pejabat PUPR, wartawan keluar pintu depan, satpam mendatangi dan berkata, "Lain kali supaya masuk lewat pintu depan," ujar Satpam Dinas PUPR Jombang tersebut.

Disanggupi oleh wartawan tersebut, "Siap" kata wartawan tersebut. Setelah itu wartawan tersebut ke kantin PUPR untuk minum kopi, belum makan sarapan. Tetapi betapa kaget, Satpam buru buru mendatangi ke kantin, "Tolong supaya parkir mobilnya diluruskan," ujar Satpam PUPR tersebut.

Wartawan itu menuruti kemauan Satpam tersebut, untuk memindahkan mobil karena dianggap salah cara parkirnya. Tetapi dengan rasa jengkel wartawan tersebut langsung pergi. Sebenarnya Satpam PUPR lebih tahu aturan, sopan santun kepada orang lain, sebenarnya untuk menjaga etika, dia bisa menunggu sampai yang punya mobil keluar dari kantin, setelah itu disampaikan nya bagaimana memarkirkan mobil yang benar, bukan orang lagi ngopi atau lagi sarapan, disuruh memindahkan mobil, apa itu aturan yang

■ Bersambung ke hal.10 kol.5

## Bupati Jombang Kunjungi Jombang Fest 2025



Bupati Warsubi Pada Acara Jombang Fest 2025 Seakan Memberikan Spirit Pada Kunjungannya Ke Stand Dinas Peternakan Jombang. (ist)

JOMBANG, BN - Dinas Peternakan Jombang memiliki peran sentral dalam menghadirkan layanan dan edukasi kesehatan hewan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga penyakit dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Karena itu disaat partisipasinya dalam Jombang Fest 2025 dalam rangka memperingati Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang ke 115 menghadirkan

berbagai layanan langsung dan edukasi kesehatan hewan gratis di stand pameran di alun-alun kabupaten jombang selama 3 hari yang di mulai hari Jum'at 24-26 Oktober 2025.

Bertepatan pada acara tersebut, Bupati Jombang Warsubi didampingi istri saat meninjau stand pameran dinas peternakan, ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan di Jombang Fest 2025.

Kegiatan yang mengutamakan produk lokal dalam ajang Jombang Fest 2025, dimana bupati memberikan dukungan, spirit, dan membuktikan komitmen untuk mempromosikan produk-produk unggulan jombang ke tingkat nasional yang lebih luas.

Bupati Jombang Warsubi pun menyampaikan, "Apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi menyaksikan Jombang Fest 2025. Semua stand kami kunjungi, ada yang unik salah satunya di stand Dinas Peternakan karena ada pemeriksaan hewan secara gratis dan susu sama telur diberikan secara gratis. Keikutsertaan ini merupakan wujud nyata dari semangat Jombang Melayani yang diangkat pemerintah daerah," ungkapnya.

Disaat itu pula, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang M. Saleh menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui stand

■ Bersambung ke hal.10 kol.5

# PT DLU Operasikan 1 Kapal Roro Surabaya – Makassar PP, Tiga Kali Seminggu

SURABAYA, BN – Tren kenaikan penumpang orang dan kendaraan yang menggunakan Armada Pelayaran Nasional PT.Dharma Lautan Utama (DLU) tujuan Surabaya – Makassar PP mulai terlihat beberapa hari yang lalu di dermaga Jamrud Pelabuhan Tanjung Perak, sehingga pihak DLU harus menambah 1 unit kapal mewah baru KM.Dharma Rucitra VII.



Kapal Roro Dharma Rucitra VII yang dialokasikan jurusan Surabaya – Makassar PP di dermaga Jamrud Pelabuhan Tg. Perak. (Foto : Ak/BN)

Sebelumnya lintas panjang tujuan Surabaya – Makassar PP itu hanya dilayani oleh kapal mewah Roll On Roll Off (Roro) KM. Dharma Kencana VII yang beberapa tahun belakangan ini semakin diminati banyak penumpang orang dan kendaraan.

Guna melancarkan mobilitas masyarakat Surabaya dan Sulawesi, khususnya Makassar sekitarnya serta terjaminnya pendistribusian barang-barang kebutuhan masyarakat, baik primair maupun sekundair, armada DLU maju sebagai transportasi laut yang menjadi penghubung terdepan wilayah kepulauan Nusantara.

Sebuah sumber resmi di DLU mengatakan, bahwa langkah alokasi 1 unit armada DLU ke Makassar sebagai langkah antisipasi kenaikan penumpang dan kendaraan yang sedang terjadi di kapal DLU. “Biasanya cuma kapal Roro KM. Dharma Kencana VII saja, namun penumpang kami dan kendaraan ada tanda-tanda kenaikan”, ujar sumber tersebut pada BIDIK Nasional baru-baru ini.

Sumber itu menjelaskan, dengan adanya alokasi 1 unit tujuan Surabaya – Makassar, maka masyarakat, logistik dan kendaraan akan mengalami 3 kali pelayaran dalam seminggu dari Surabaya bersama kapal ferry DLU dengan nyaman, aman, selamat dan tenang.

Dia juga mengungkapkan, bahwa eksistensi kapal ferry DLU dan alokasinya untuk melayani kebutuhan transportasi laut bagi warga serta ekspedisi-ekspedisi dari Surabaya ke Makassar dan juga sebaliknya. “Berapa pun jumlah kendaraan ke Makassar dan sebaliknya, kapal ferry DLU tetap mampu memuatnya”, jelas sumber tersebut.

Menurutnya, kapasitas muat kendaraan secara umum rata-rata 50 unit bagi masing-masing kapal Roro KM. Dharma Kencana VII dan KM. Dharma Rucitra VII. “Kecepatan rata-rata dari dua kapal Roro tersebut, hanya 30 jam Surabaya – Makassar dan begitu pun dari Makassar ke Surabaya”, ujarnya.

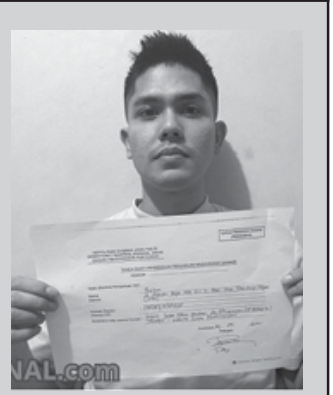
Jadi, lanjut sumber itu pula, memilih berlayar bersama kapal ferry DLU Surabaya – Makassar PP sangat tepat untuk menghadapi suatu urusan penting dalam waktu yang tergolong cepat. “Daya tempuh yang cepat di lintas panjang, memang sudah dirancang oleh pihak DLU dengan kecepatan yang tinggi dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang butuh serba cepat”, ungkapnya.

Kapal Roro Dharma Rucitra VII tersebut tampak seperti kapal cruise sedang memuat sejumlah kendaraan dan penumpang orang. Petugas polisi yang menjaga keberangkatan kapal ferry ber Kantor di kompleks Ruko Jl.Perak Timur 512 Surabaya itu turut mengomentari, bahwa pelayaran DLU sudah menjadi langganan masyarakat dan ekspedisi untuk penyeberangan lintas panjang dengan nyaman dan aman”, kata yang tak perlu disebutkan namanya itu. (Akariem)

## Penyidik Polrestabes Surabaya Dilaporkan ke Propam Polda Jatim, Ini Perkaranya



Kantor Polrestabes Surabaya. (ist)



SURABAYA, BN – Merasa kasusnya tak kunjung jelas, M. Raihan Al Ayyubi melaporkan penyidik yang menangani perkaranya ke Propam Polda Jawa Timur. Ia mengaku lelah karena harus bolak-balik dari Jakarta ke Surabaya hanya untuk memantau perkembangan laporannya yang terkesan jalan di tempat.

Raihan mengatakan, dirinya tengah melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya. Namun, hingga kini ia menilai proses penyelidikannya lambat dan terkesan berbelit-belit.

“Saya capek bolak-balik dari Jakarta ke Surabaya untuk update perkara saya. Seolah-olah diperumit, padahal saya mendapat informasi penyidik sudah menghadirkan ahli pidana,” ujar Raihan, Selasa (4/11/2025).

Merasa proses penyelidikan tak kunjung jelas, Raihan bersama keluarga melaporkan penyidik yang menangani kasus tersebut, ke Bidang Pengawasan Penyidik (Wassidik) Propam Polda Jawa Timur.

Menurut Raihan, Langkah itu diambil agar pihak Wassidik juga melakukan pemantauan terhadap jalannya penyelidikan dan penyidikan kasusnya.

“Kami laporkan penyidikannya ke Wassidik Polda Jatim pada 24 Oktober 2025 kemarin. Harapan kami, ada pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyidik agar perkara ini tidak terus berlarut,” tegasnya.

Kasus yang dilaporkan Raihan ke Polrestabes Surabaya telah berjalan cukup lama. Ia membuat laporan sejak 20 Maret 2025 dengan nomor perkara LP/B/268/III/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya/polda jatim.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan sebuah outlet rumah makan bernama Joder Ka Dhani. Dalam kasus itu, Raihan mengaku mengalami kerugian mencapai Rp150 juta.

Ia menilai, dengan bukti dan keterangan saksi yang sudah cukup kuat, termasuk adanya permohonan keterangan ahli pidana, seharusnya penyidik sudah dapat menetapkan tersangka. Namun hingga kini, status perkara itu masih belum menunjukkan perkembangan berarti.

“Harapan saya, penyidik segera menetapkan tersangka dan naik status perkaranya dari Penyelidikan ke Penyidikan. Serta perkara saya jangan dibuat ngambang,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Dewi saat dikonfirmasi Bidiknasional melalui pesan WhatsApp berkaitan Penyidik yang dilaporkan ke Wassidik Polda Jatim tersebut, ia mengarahkan untuk konfirmasi ke Propam Polda Jatim. “Tanya Propam Polda,” tandas Rina. (Teddy Syah)

## TMMMD ke-126 Usai, Silaturahmi Menguat: Malam Pengajian Penuh Keakraban di Desa Kedondong

SIDOARJO, BN – Kodim 0816 satgas TMMMD ke-126, Suasana hangat dan penuh kebersamaan menyelimuti Balai Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, pada senin 3/11/2025 di malam penutupan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD) ke-126 Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Kodim 0816/Sidoarjo. Acara yang dikemas dalam bentuk pengajian dan malam keakraban ini menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan TMMMD yang telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir.



Sejak pukul 19.00 WIB, ratusan warga tampak memenuhi balai desa dengan penuh antusias. Kegiatan diawali dengan lantunan sholawat dari grup Banjari gabungan Yon Zipur dan Polresta Sidoarjo yang menghadirkan nuansa religius sekaligus menumbuhkan semangat persaudaraan. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti pembacaan doa bersama sebagai ungkapan syukur atas terselenggaranya TMMMD yang berjalan dengan lancar dan sukses.

Dalam kegiatan ini, hadir sejumlah tokoh penting, antara lain Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, S.H., M.Han., selaku Dandim 0816/Sido-

arjo, perwakilan pemerintah daerah, unsur Forkopimka Tulangan, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta aparat keamanan dari TNI dan Polri.

Dalam sambutannya, Dandim 0816/Sidoarjo menyampaikan bahwa TMMMD ke-126 bukan sekadar kegiatan pembangunan fisik, tetapi juga merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, TMMMD berhasil mewujudkan berbagai program yang berdampak langsung bagi warga. “TMMMD ini tidak hanya membangun jalan atau rumah, tapi juga membangun semangat, kebersamaan, dan kepercayaan antarwarga serta antara TNI dengan masyarakat. Semua ini adalah hasil kerja keras dan gotong-royong kita bersama,” ujar Letkol Czi Shobirin Setio Utomo.

Dandim juga menuturkan sejumlah capaian dalam program TMMMD ke-126, di-

antaranya pembangunan prasarana jalan desa, pemasangan 10 titik lampu PJU, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta pelatihan keterampilan masyarakat seperti pembuatan pupuk kompos dan tata rias (MUA).

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak – mulai dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat Desa Kedondong Bidiknasional.com- atas dukungannya, kerja sama, dan semangat gotong-royong yang luar biasa selama pelaksanaan TMMMD.

Acara pengajian semakin khidmat dengan tausiyah yang disampaikan oleh Dr. (H.C.) K.H. Zulfa Mustofa. Dalam ceramahnya, beliau menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah, rasa syukur atas hasil pembangunan, serta tanggung jawab bersama untuk memelihara dan memanfaatkan hasil TMMMD secara berkelanju-

tan.

“Pembangunan fisik bisa selesai, tetapi pembangunan hati dan semangat gotong-royong harus terus hidup di tengah masyarakat,” pesan K.H. Zulfa Mustofa dalam tausiyahnya.

Malam pengajian ini juga menjadi momen refleksi dan kebersamaan bagi warga Desa Kedondong. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih kepada Satgas TMMMD yang telah membantu memperbaiki sarana desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Warga berharap agar semangat kebersamaan dan pembangunan tidak berhenti setelah TMMMD usai.

“Kami bersyukur sekali, hasilnya sudah kami rasakan. Jalan desa kini terang dan rumah warga yang dulu tak layak kini bisa dihuni dengan nyaman,” ungkap salah satu warga dengan penuh haru.

Acara pengajian penutupan TMMMD ke-126 Kodim 0816/Sidoarjo berlangsung penuh keakraban, doa, dan rasa syukur. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan TMMMD ini, diharapkan hasil pembangunan dapat terjaga, bermanfaat bagi masyarakat, serta memperkuat semangat gotong-royong dan persatuan antara TNI dan rakyat. (yah)

## Wujudkan Pertanian Mandiri, Satgas TMMMD ke-126 Kodim Sidoarjo Latih Warga Kedondong Buat Pupuk Kompos



SIDOARJO, BN – Dalam upaya mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD) ke-126 Kodim 0816/Sidoarjo kembali menggelar kegiatan non-fisik yang edukatif dan bernilai guna bagi warga Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, pada senin 3/11/2025.

Kegiatan kali ini menghadirkan Iwan Pitono, narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur, yang memberikan pelatihan tentang cara pembuatan pupuk kompos dengan metode fermentasi sederhana. Pelatihan tersebut mendapat sambutan hangat dan antusias dari para peserta, khususnya para petani dan warga yang tertarik mengembangkan pertanian organik mandiri.

Dalam penyampaianannya, Iwan Pitono menjelaskan secara rinci tahapan pembuatan pupuk kompos, mulai dari pemilihan bahan organik, proses pencampuran dengan aktivator, hingga tahap fermentasi yang menghasilkan kompos berkualitas tinggi.

Ia menegaskan bahwa penggunaan pupuk organik dapat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. “Pupuk kompos bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga dapat menghemat biaya produksi pertanian. Dengan memanfaatkan limbah organik di sekitar rumah, masyarakat bisa menghasilkan pupuk alami yang bermanfaat dan bernilai ekonomi,” ujar Iwan Pitono di sela kegiatan.

Sementara itu, Komandan SSK Satgas TMMMD ke-126 Kodim 0816/Sidoarjo, Letda Inf Rafly Fathoni, menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen TNI dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di bidang pertanian berkelanjutan.

“Melalui pelatihan ini, kami ingin memberikan bekal pengetahuan kepada warga agar mampu memanfaatkan potensi alam di sekitarnya. TMMMD bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga menumbuhkan kemandirian dan semangat gotong royong masyarakat,” ungkapnya penuh semangat.

Antusiasme peserta semakin terasa saat sesi tanya jawab berlangsung. Warga tampak aktif bertanya dan berdiskusi mengenai teknik pengolahan limbah organik dan penerapannya di lahan pertanian mereka.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi bukti nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pemberdayaan di bidang pertanian. Semangat kebersamaan yang terjalin di kegiatan ini sejalan dengan tujuan utama TMMMD, yakni membangun negeri dari desa, demi terciptanya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera. (yah)

## Sekcam Panceng Gresik Tekankan Integritas dan Loyalitas



Sekcam Panceng Gresik, Yono, SP. (Subhan Arif)

GRESIK, BN – Sekcam Panceng Gresik, Yono, SP.

menekankan pentingnya integritas dan loyalitas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan. Jum’at (10/10/25), beliau menyampaikan beberapa poin penting terkait kepemimpinan dan budaya kerja.

Sekcam menggarisbawahi bahwa loyalitas hirarkis harus diimbangi dengan adab yang baik, baik dalam mengawal kebijakan

pimpinan maupun saat memberikan saran jika diperlukan.

Selain itu, Sekcam juga menekankan pentingnya komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Beliau berharap agar seluruh jajaran pemerintahan kecamatan dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.

Pada sesi wawancara tersebut, Sekcam juga membahas tentang

pentingnya budaya kerja yang baik dalam pemerintahan. “Budaya kerja yang baik dapat membantu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Atas hal ini, Sekcam Panceng Gresik berkeinginan dapat membentuk pemerintahan yang dinamis dan obyektif, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Subhan Arif)

## Dana Desa Kebonwaris ...

Sambungan hal. 2

Rp.734.172.400? Pembaruan data terakhir pada 30 Oktober 2025 yang menampilkan informasi penyaluran Dana Desa Kebonwaris Tahun 2024 menyajikan realisasi penggunaan Dana Desa Kebonwaris dengan nilai pembiayaan terbesar di digunakan untuk kegiatan:

1. Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (profil penduduk dan potensi desa Rp.65.300.000; 2.) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi Informasi Lokal Desa Rp.23.501.112; 3.) Pemeliharaan Sanitasi Perumahan (Gorong-gorong, dan Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) Rp.21.318.800; 4.) Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Rp 16.360.000; 5.) Keadaan Mendesak Rp 100.800.000

Terlepas dari kesan janggal, rendahnya penyerapan Dana Desa Kebonwaris tersebut tentu menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya menurunnya kualitas pelayanan publik, terhambatnya pembangunan infrastruktur, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui informasi yang tepat, akurat, dan benar atas selisih pagu penyaluran, sisa lebih penggunaan atas penerimaan, hingga keperuntakan Dana Desa Kebonwaris. Redaksi BIDIK NASIONAL secara resmi akan mengajukan surat konfirmasi. Kak jawab Kepala Desa Kebonwaris bisa menghubungi redaksi HP 08123209649 atau email; bidiknasional@yahoo.com . Berita selanjutnya ikuti Liputan Khusus BIDIK NASIONAL edisi selanjutnya. (Teddy/Lipsus)

## Pembangunan Kelurahan Panjang Baru Diduga Tak Sesuai RAB



Proyek Gedung Kelurahan Panjang Baru, Kota Pekalongan. (Dikin)

KOTA PEKALONGAN, BN – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Pekalongan Raya melakukan pemantauan terhadap proyek pembangunan gedung Kelurahan Panjang Baru, Kota Pekalongan, pada Sabtu (1/11/2025) sekitar pukul 10.20 WIB.

Proyek yang didanai APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Rp 591 juta tersebut menjadi sorotan karena ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran teknis

dan standar keselamatan kerja.

Ketua GNPK-RI Pekalongan Raya, Zaenuri, mengungkapkan bahwa dari hasil inspeksi lapangan, beberapa pekerja terlihat tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja (K3) dengan alasan cuaca panas. Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dibenarkan karena aspek keselamatan merupakan kewajiban dalam setiap kegiatan konstruksi.

“Proyek yang menggunakan anggaran negara harus transparan dan sesuai

aturan. Jika pengawasan lemah, potensi penyimpangan dan kerugian negara sangat mungkin terjadi,” tegasnya.

Selain itu, GNPK-RI juga mendapati dugaan ketidaksesuaian pada material yang dipakai, mulai dari bata merah, tanah urug, hingga pasir. Material tersebut disebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau bestek yang seharusnya diterapkan. Dengan kata lain proyek ini tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga berpotensi terjadi korupsi.

Zaenuri menilai lemahnya pengawasan dari dinas terkait maupun konsultan pengawas turut memperbesar risiko terjadinya penyimpangan kualitas pekerjaan.

Menariknya, pernyataan dari salah satu penyedia material menguatkan dugaan lemahnya pengendalian mutu di lapangan. Penyedia menyebut pihaknya hanya memenuhi permintaan pem-

beli.

“Kami ini penjual. Permintaan apa, ya kami siapkan. Sesuai bestek atau tidak, kami kurang tahu. Intinya Anda beli, kami jual,” ujar penyedia material tersebut.

GNPK-RI Pekalongan Raya menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk rendahnya kontrol kualitas dalam rantai pekerjaan proyek dan menjadi alarm bagi instansi terkait.

Sebagai rekomendasi, GNPK-RI mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi serta mempertimbangkan tidak lagi menggunakan jasa konsultan pengawas yang dinilai kurang kompeten dalam menjalankan tugasnya.

GNPK RI berkomitmen terus mengawal proyek-proyek pemerintah di wilayah Pekalongan Raya demi terciptanya tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan bebas praktik penyimpangan.

(Dikin)

## Kejaksanaan Selidiki Dugaan Korupsi di PDAM Tirtayasa Kota Pekalongan



KOTA PEKALONGAN, BN - Aroma tak sedap kembali menyeruak dari tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan. Setelah sebelumnya disorot publik karena keluhan kualitas air dan dugaan jual-beli jabatan, kini perusahaan milik Pemerintah Kota Pekalongan itu

tengah diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat atas dugaan tindak pidana korupsi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Pekalongan, Baskoro, membenarkan penyidikan tersebut. Menurut dia, proses ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Kota Pekalongan tertanggal 23 April 2025 yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2022 dan 2023.

“Tim penyidik telah memanggil sejumlah pegawai Perumda Tirtayasa untuk dimintai keterangan sejak akhir Agustus 2025. Kami masih dalam tahap pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan saksi. Untuk calon tersangka belum bisa kami umumkan. Nanti, jika sudah lengkap, akan kami sampaikan ke publik,” ujar Baskoro, Selasa (28/10/2025). Baskoro menjelaskan, penyidikan berawal dari laporan salah satu pihak yang belum dapat disebutkan identitasnya. Tim penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan peralatan air bersih serta indikasi penggunaan sumber air yang tidak memenuhi standar kesehatan.

Meski nilai kerugian negara belum diungkap, Kejari menduga terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dalam sejumlah proyek pengadaan dan layanan teknis perusahaan tersebut. Kasus dugaan korupsi ini menambah panjang daftar persoalan di tubuh Perumda Tirtayasa. Dalam dua tahun terakhir, perusahaan itu kerap menuai keluhan dan protes warga. November 2023: Warga melaporkan Tirtayasa ke Kejari karena air yang dinilai tidak layak konsumsi berdasarkan hasil uji laboratorium independen.

Desember 2023: Konsumen menggelar aksi demonstrasi menuntut pencopotan direktur utama akibat pelayanan yang dianggap buruk dan tidak transparan. Oktober 2024: Muncul dugaan praktik jual-beli jabatan dalam promosi pegawai di internal perusahaan.

Serangkaian persoalan itu dinilai memperkuat anggapan bahwa tata kelola Tirtayasa masih bermasalah. Sejumlah elemen masyarakat mendesak agar Kejari menangani kasus ini secara terbuka. Mereka berharap penyidikan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjadi momentum perbaikan manajemen perusahaan daerah yang menyangkut kebutuhan dasar warga.

Pemerintah Kota Pekalongan pun diminta memperketat pengawasan terhadap badan usaha milik daerah (BUMD), khususnya yang bergerak di sektor layanan publik vital seperti air bersih. “Kami bayar tiap bulan, tapi airnya tidak layak konsumsi. Kalau memang ada penyimpangan, ungkap semuanya!” ujar salah satu warga pelanggan Tirtayasa.

Masyarakat berharap, proses hukum ini mampu membersihkan Perumda Tirtayasa dari praktik korupsi sekaligus memulihkan kepercayaan publik yang selama ini menurun akibat buruknya pelayanan. (dikin)

## Jalan Desa Pasir Geulis dan Jangraga Rusak Parah, Luput Perhatian Pemkab Pangandaran

PANGANDARAN, BN -Harapan di setiap wilayah tentunya akan sama, atas nama pemerintah desa ataupun masyarakat sekalipun harapan dan impian wilayahnya diperhatikan oleh pemerintah Daerah, apalagi yang sekarang ini sedang dirasakan terkait tanggung jawab pemerintah di bidang infrastruktur khususnya harapan dan keinginan Desa bisa terakumulasi. Ada pembangunan perbaikan jalan lintas Kecamatan bisa juga penghubung Lintas Desa yang rusak parah.

Telah ditemui BN salah satu Desa di Kecamatan Mangunjaya yakni Desa Jangraga, Kepala Desa feri keptina saat diklarifikasi di ruang kerja Senin 3 November 2025 menyampaikan, atas nama Pemerintah desa mengharapkan kemajuan untuk Desa nya apalagi yang berkaitan dengan infrastruktur, yang merupakan aset penunjang perekonomian atau penunjang sektor yang lainnya.

“Harapan saya setelah masuk dan disahkan status Jalan Gondang menuju Desa Pasir Geulis sebagai jalan kabupaten untuk segera di bangun,” ujarnya.

Harapan lain disampaikan, sering kali terkendala di lintasan jalan Gondang yang meliputi RT 20, 21, dan 22 / RW 06 Lamban dalam membayar pajak sering kali terdengar bahasa riak masyarakat wilayahnya di anak tirikan, “padahal pemerintah desa sudah mengetahui bahwa jalan



Jalan lintas Kecamatan sebagai penghubung Lintas Desa yang rusak parah. (Karsono)

tersebut adalah jalan milik kabupaten,” pungkas Feri menutup perbincangan.

Begitu juga disampaikan kepala Desa Pasir Geulis di wilayah Kecamatan Padaherang, Yoyo sudaryo, “Harapan kami tentunya sama dengan desa sebelah Desa Jangraga, masyarakat Pasir Geulis dambakan jalan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Lintas Desa, lintas Kecamatan Padaherang & Mangunjaya untuk segera di bangun, ini semua Tanggung jawab pemerintah daerah setelah pengajuan di tahun 2023 melalui Reses Dewan di kecamatan Padaherang dan Mangunjaya. Alhamdulillah langsung di terima oleh Bupati dan di syahkan Sebagai status jalan Kabupaten, Kalaupun tidak diakui kala itu upaya kami sudah pasti prioritas untuk bisa di bangun,” ujarnya.

Selain itu Yoyo menyampaikan ucapan terimakasih atas partisipasi dan kunjungan untuk membantu memperjuangkan aspirasi Pemerintah desa dan Masyarakat nya , untuk menyampaikan kepada Pemerintah yang berwenang dalam bidang nya.

“Semoga di tahun depan di 2026 Jalan Pasir Geulis menuju Desa Jangraga dengan panjang seluruh kurang lebih sekitar 3 Kilo meter bisa di bangun untuk menunjang perekonomian,” pungkas nya mengakhiri perbincangan.

(Karsono)

## Tingkatkan Fasilitas Pendidikan, Pembangunan di SMPN 4 Banjarsari Berjalan Lancar



Proyek SMPN 4 Banjarsari dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). (asep sujana)

CIAMIS, BN - Peningkatan fasilitas pendidikan di Kabupaten Ciamis terus menunjukkan kemajuan positif. Tahun ini, SMPN 4 Banjarsari mendapatkan program pembangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pendidikan Kementerian Pendidikan.

Pekerjaan yang tengah dilaksanakan meliputi 3 ruang kelas baru, 2 ruang administrasi, 1 unit WC, serta 1 mushola. Proyek ini dikerjakan oleh Herlan

Fabelan, pelaksana lapangan asal Sindangasih, Kecamatan Banjarsari, yang memastikan seluruh pekerjaan dilakukan sesuai petunjuk teknis.

“Alhamdulillah, progres pembangunan berjalan lancar dan sesuai spesifikasi. Kami terus berupaya menjaga kualitas agar hasilnya dapat digunakan secepatnya oleh pihak sekolah,” ujar Elan.

Kepala SMPN 4 Banjarsari, Dudi Pamungkas, turut mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah.

“Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan ini. Semoga fasilitas baru ini dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan kinerja para guru,” ucapnya.

Satu harapan lagi semoga jalan yg menuju ke sekolah perlu ada perbaikan karena masih belum tersentuh pembangunan panjang sekitar 700 meter. Dengan selesainya pembangunan ini, diharapkan kegiatan belajar mengajar di SMPN 4 Banjarsari semakin nyaman, tertata, dan bernuansa religius melalui keberadaan mushola yang representatif.

(Asep sujana)



LBH Ansor Jateng ketika mendatangi Polres Kendal guna meminta perlindungan hukum Muslih, korban pengeroyokan. (peni)

## LBH Ansor Jawa Tengah Dampingi Korban Penganiayaan dan Pengeroyokan ke Polres Kendal

■ BACA ke hal.10 kol.5

## Program JIAT di Desa Sukamaju Dorong Ketahanan Pangan Petani Mangunjaya



Program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy di Desa Sukamaju. (asep s)

bergantung pada musim hujan. Dalam pelaksanaannya, proyek ini dimenangkan oleh Haji Asep selaku pemenang tender, sementara pelaksana lapangan Ika bersama tim bekerja secara sinergis dengan pengawas lapangan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BBWS Citanduy untuk memastikan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.

Warga setempat menyambut positif program ini karena diyakini akan memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah melalui BBWS Citanduy yang telah memperhatikan kebutuhan petani di Desa Sukamaju. Dengan adanya sumur bor dan jaringan air tanah ini, sawah kami bisa tetap produktif meski di musim kemarau,” ujar salah seorang petani setempat.

Program JIAT ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah dalam mendukung kemandirian pangan melalui pemanfaatan sumber daya air tanah secara berkelanjutan.

(Asep sujana)

## Polsek Banjar Sambangi Jajawar Wetan, Pererat Sinergi Pemerintah Desa dan Warga



Kapolsek Banjar AKP Yudy Ristiyanti, S.H., saat mengunjungi desa Jajawar Wetan. (asep s)

BANJAR, BN – Kapolres Banjar AKBP Tyas Puji Rahadi, S.I.K. melalui Kapolsek Banjar AKP Yudy Ristiyanti, S.H., menegaskan bahwa kegiatan sambang yang dilakukan jajaran Polsek Banjar bukan sekadar kunjungan biasa, tetapi merupakan sarana untuk mempererat silaturahmi antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat.

Kegiatan sambang tersebut dilaksanakan di Jajawar Wetan RT 23 RW 11, Desa Jajawar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, pada Selasa (28/10/2025). Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Banjar bersama anggotanya berkoordinasi dengan Kepala Desa Jajawar Samsudin, S.Pd.I. dan perangkat desa setempat.

“Dengan silaturahmi, Polri dapat menyerap informasi secara langsung dari masyarakat serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar AKP Yudy Ristiyanti.

Kepala Desa Jajawar Samsudin, S.Pd.I. menyampaikan apresiasinya atas kehadiran jajaran Polsek Banjar di wilayahnya. “Kami sangat berterima kasih atas perhatian Polri yang terus hadir di tengah masyarakat. Kegiatan sambang seperti ini sangat bermanfaat untuk mempererat kerja sama antara aparat keamanan dan pemerintah desa,” ucap Samsudin.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh keakraban. Warga berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut sebagai bentuk nyata kedekatan Polri dengan masyarakat. (Asep sujana)

# Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Atas Nota Keuangan dan Rancangan Perda 2026 Serta APBD TA 2025

BLITAR, BN - Pemerintah daerah resmi menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Agenda strategis ini menandai babak baru perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar untuk tahun mendatang. Demikian hasil Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Senin malam Tgl 3/11/2025.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD, H. M. Rifa'i, ini menghadirkan jajaran pimpinan daerah lengkap. Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, M.M., didampingi Wakil Bupati H. Beky Herdihansah, beserta seluruh elemen Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memadati ruang sidang. Turut mendampingi adalah Wa-

kil Ketua II, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn., Wakil Ketua III, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP., M.AP., serta Sekretaris DPRD, Haris Susianto, S.H., M.Si.

## Momentum Strategis Perencanaan Daerah ;

Wakil Ketua I DPRD menjelaskan, paripurna malam ini merupakan respons cepat atas surat resmi Bupati Blitar Nomor B/900.01.03.01/436/409.6.2/2025 tertanggal 30 Oktober 2025.

"Rapat paripurna ini difokuskan pada penyampaian penjelasan Bupati atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah," tegas H. M. Rifa'i.

Agenda ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan fondasi

bagi seluruh program pembangunan yang akan dijalankan tahun depan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bupati Rijanto mengapresiasi sinergitas yang terbangun antara eksekutif dan legislatif.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang," ungkapnya dengan penuh harap.

Orang nomor satu di Kabupaten Blitar juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembahasan. "Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan ridho-Nya dalam proses pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026, sehingga roda pembangunan di



Penyampaian Laporan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar. (Sastro)

Kabupaten Blitar dapat berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat," pungkasnya.

Dengan dimulainya pembahasan RAPBD 2026, masyarakat Kabupaten

Blitar kini menanti realisasi program-program prioritas yang akan menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara komprehensif dan berkelanjutan. (Sastro)

## Asisten 1 Kabupaten Jombang Salurkan BLT DBHCHT Simbolis, Didampingi Kepala Dinsos Jombang Agung Hariadi



Asisten 1 Setdakab Jombang, Purwanto mewakili Bupati Jombang, Warsubi saat menyerahkan BLT DBHCHT kepada perwakilan buruh tani Tembakau. (efn)

JOMBANG, BN - Pemerintah menyalurkan DBHCHT ke masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi buruh tani tembakau dan pekerja pabrik rokok, melalui Bantuan Dana Tu-

nai (BLT). Pada pelaksanaan penyaluran untuk kegiatan sosial tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dan menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tem-

bakau (DBHCHT) tahun 2025 di Kantor Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Kamis (09/10).

Dengan jumlah masyarakat yang ingin mendapatkannya, kurang lebih sebanyak 143 orang menerima BLT DBHCHT di Kantor Kecamatan Plandaan. Dengan rincian, dari Desa Bangsri sebanyak 48 orang, Lalu dari Desa Plandaan 40 orang, dan dari Desa Plabuhan sebanyak 55 orang.

Dari masing-masing penerima menerima Rp 300.000,- dikalikan 4 kali, sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp1.200.000,- Penyerahan BLT DBHCHT

dilaksanakan secara simbolis oleh Asisten 1 Setdakab Jombang, Purwanto mewakili Bupati Jombang, Warsubi kepada perwakilan buruh tani Tembakau, buruh tani Cengkeh, dan buruh pabrik rokok di Kantor Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang.

Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, dan beberapa kepala SKPD (Satuan Perangkat Kepala Daerah), diantaranya, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang, Isawan Nanang Risdianto, Sekretaris Dinas Pertanian Jombang, Plt. Camat Plandaan dan Forkopimcam Plandaan,

serta para kepala desa di Kecamatan Plandaan.

Sementara itu di hari yang sama, selain di Kantor Kecamatan Plandaan, juga disalurkan BLT DBHCHT di Kantor Desa Purisemanding untuk penerima dari Desa Purisemanding, Desa Kampong Baru, Desa Klitih, dan Desa Tondowulan. Kemudian di Kantor Desa Darurejo untuk penerima dari Desa Darurejo dan Desa Jipohrapah.

Selain itu, bukan hanya di Kecamatan Plandaan, pada Kamis (10/09) ini, juga disalurkan BLT DBHCHT untuk penerima di Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Bareng, dan Kecamatan Wonosalam. "Tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya," ujar Purwanto.

Disampaikan Purwanto juga, baru pada tahun 2025 ini, buruh tani Cengkeh mendapatkan BLT DBHCHT seperti buruh tani Tembakau dan buruh pabrik rokok.

Dijelaskannya lagi, kepada seluruh penerima BLT DBHCHT untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah Pusat maupun Pemkab Jombang yang dipimpin oleh Bupati Jombang, Warsubi dan Wakil Bupati Jombang, M. Salmanudin atas realisasi BLT DBHCHT tahun 2025.

Bahkan menurut nya, "kalau bisa kita bisa mengajak semua pihak untuk mengawasi dan memantau peredaran rokok ilegal yang merugikan negara," ujarnya.

Disaat itu juga disampaikan oleh Kepala Dinsos Jombang Agung Hariadi,

bahwa pada tahun 2025 ini, sebanyak 11.504 orang menerima BLT DBHCHT di Kabupaten Jombang. "Buruh tani Tembakau sebanyak 6074, buruh tani Cengkeh sebanyak 1676, dan buruh pabrik rokok sebanyak 3754," ujar Agung Hariadi.

Pada proses penyaluran lancar, dan bantuan tersebut di berikan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak ekonomi akibat fluktuasi sektor industri hasil tembakau. Setiap penerima manfaat menerima bantuan secara tunai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

(Tok)

## Mengucapkan

# Selamat Hari Jadi Pamekasan Ke-495 "Pamekasan Kreatif Dan Maju"

Bupati Pamekasan



Drs. Kholilurrahman, SH, M.Si.

Wakil Bupati Pamekasan



H. Sukriyanto

Sekda Pamekasan



Masrukin, S.Sos, M.Si.

Plt Kadis Kominfo



Drs. Taufikurrahman, M.Si.

Kepala BKD



Sahrul Munir, S.Sos, M.Si.

Kadis PUPR



Amin Djabir, ST.  
Kadis Disperindag

Kadis DPRKP



Muharram, ST.  
Kadis Porapar



Basri Yulianto, SH, M.Si.  
Kadiskop UKM, dan Tenaga Kerja



Drs. Fathorrahman, M.Si.



Muttaqin, S.Sos, M.Si.



Kusairi, SE.  
Plt Kadis PMD

## Se Malam di Madura Semarakkan Hari Jadi Pamekasan Ke-495



Pembukaan Se Malam di Madura semarakkan Hari Jadi Pamekasan Ke-495.



Bupati Pamekasan Dr. Kholilurrahman, SH, M.Si.

PAMEKASAN, BN - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) menggelar acara Se Malam Di Madura dalam rangka memperingati Hari Jadi Pamekasan ke-495 yang bertempat di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Sabtu malam (01/

11/2025).

Kegiatan itu dibuka langsung oleh bupati Pamekasan Dr. Kholilurrahman SH, M.Si yang didampingi oleh wakil bupati Sukriyanto dengan di hadir oleh para undangan yang terdiri dari perwakilan Kementerian Kebudayaan RI bapak Samsul Hadi, SH, MM dan budayawan madura

Drs. Kadarisman Sastrodiwirjo, Msi dan ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur juga dari unsur pimpinan forkopimda dan forkopimcam se-Kabupaten Pamekasan.

Dalam kegiatan Se-Malam di Madura tersebut menampilkan berbagai jenis tari-tarian dari masing-masing perwakilan

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

## Peringati Hari Jadi Pamekasan ke 495, Disdikbud Gelar Festival Musik Daul



Festival musik Daul yang digelar Disdikbud Kabupaten Pamekasan (Foto: ist)

PAMEKASAN, BN - Pemerintah kabupaten Pamekasan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar festival musik daul se-kabupaten Pamekasan dalam rangka memeriahkan hari jadi Pamekasan ke-495 tahun. Acara digelar di area Monumen Arek Lancor, Rabu malam 29/10/2025.

Kegiatan festival musik Daul yang digelar dibuka langsung oleh bupati Pamekasan Dr. Kholilurrahman SH, M.Si di dampingi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah kabupaten Pamekasan Akhmad Zaini, M.Pd, M.HP juga Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pamekasan Moh. Alwi, S.Sos, M.Si beserta jajarannya.

Dalam sambutannya bupati Pamekasan Dr. KH. Kholilurrahman, SH, Msi menyampaikan terima kasih kepada peserta musik daul yang telah ikut serta menyemarakkan kegiatan peringatan hari jadi Pamekasan ke-495 yang di gelar oleh pemerintah kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu pihaknya mengajak terhadap semua elemen masyarakat supaya tetap menjaga marwah musik daul/ tong-tong yang selama ini menjadi ajang kreatifitas bagi masyarakat Pamekasan sebagai musik tradisional.

"Saya nyatakan atas nama pemerintah kabupaten Pamekasan pagelaran festival musik daul se-Pame-

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

# Fraksi - Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Terkait Raperda Dalam Rapat Paripurna DPRD Kendal



Suasana Rapat Paripurna DPRD Kendal dengan agenda Pandangan Umum Fraksi - Fraksi atas Penyampaian Raperda Kabupaten Kendal. (Peni)

**KENDAL, BN-** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal menggelar Rapat Paripurna pada hari Jumat (17/10/2025) di Gedung DPRD Kendal dengan agenda rapat Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penyampaian Raperda Kabupaten Kendal.

KETUA DPRD Kendal, Mahfud Sodik memimpin acara tersebut. Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan, kritik, dan saran terhadap kebijakan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.

Fraksi-fraksi menyoroti beberapa aspek seperti efektivitas belanja daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tentunya diharapkan

program-program tersebut bermuara kepentingan masyarakat Kabupaten Kendal.

Dalam rapat Paripurna sebelumnya membahas empat Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Farmasi Kendal, perubahan ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah, pembentukan dana cadangan untuk Pilkada

2029, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kendal 2025-2045. Rapat hari ini adalah tindak lanjut dari penyampaian Raperda oleh Bupati Kendal.

"Rapat ini menjadi wadah bagi fraksi untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif. Semua pandangan tersebut akan menjadi dasar pembahasan lanjutan antara legislatif dan eksekutif," ujar Mahfud dalam sambutannya.

Pandangan umum fraksi ini menjadi pijakan untuk penyusunan APBD Kendal 2026 agar lebih efisien, transparan, dan responsif. Ainur Rokim dari Fraksi Ge-

rindra melakukan interupsi dalam rapat. Ia menyoroti minimnya kehadiran pejabat eselon dari pihak eksekutif dan dianggap kurang menghargai forum tertinggi di DPRD.

"Dalam forum penting seperti ini seharusnya jajaran kepala dinas hadir. Kami sebagai mitra merasa tidak dihargai. Tolong ini jadi perhatian bagi Ibu Bupati agar anak buahnya lebih menghormati mekanisme Paripurna," ucapnya.

Ainur juga mengusulkan, "Pandangan umum fraksi dikumpulkan secara tertulis sebagai bentuk penegasan atas sikap

DPRD terhadap rendahnya partisipasi pihak eksekutif," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini Ketua DPRD Mahfud Sodik menyatakan akan mengecek daftar hadir perwakilan OPD yang seharusnya mengikuti rapat secara lengkap.

"Kami akan mengecek kehadiran pejabat eksekutif dalam rapat selanjutnya agar pembahasan kebijakan daerah dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab," katanya.

Diakhir rapat Ketua DPRD Kendal menyampaikan perubahan jadwal kegiatan DPRD Ka-

upaten Kendal bulan Oktober 2025. Berdasarkan hasil rapat pimpinan, sejumlah agenda penting mengalami penyesuaian waktu, termasuk rapat paripurna lanjutan yang akan digelar pada 20, 21, 27, dan 28 Oktober 2025.

Agenda terdekat pada 20 Oktober mendatang akan membahas jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi serta pendapat Bupati terhadap Raperda prakarsa DPRD. Sementara pada 27-28 Oktober, DPRD akan fokus pada pembahasan Raperda APBD Tahun 2026 serta pembentukan dan penambahan tugas Panitia Khusus. (Peni/ADV)

## GNPK-RI Temukan Dugaan Penyimpangan Proyek SMA Negeri 2 Pekalongan



Proyek SMA Negeri 2 Pekalongan. (Foto: Dikin)

**KOTA PEKALONGAN, BN-** Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Pekalongan Raya melakukan pemantauan terhadap proyek pembangunan gedung SMA Negeri 2 Kota Pekalongan. Proyek senilai sekitar Rp1,77

miliar tersebut diduga tidak mendapatkan pengawasan ketat dari pihak terkait.

Ketua GNPK-RI Pekalongan Raya, Zaenuri, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan

konstruksi di lapangan.

"Dari hasil pantauan, kami menduga ada material yang tidak sesuai bestek. Material tanah urug yang digunakan berasal dari kawasan Talun, Kabupaten Pekalongan, dan diduga tidak memiliki izin. Termasuk penggunaan bata merah berukuran besar yang perlu dipastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis," ungkapnya, Sabtu (1/11/2025).

Selain material, Zaenuri juga menyoroti metode kerja yang dinilai tidak profesional pada proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. "Pekerja masih menggunakan peralatan manual seperti cangkul karena molen beton mati dan tidak diganti. Ini sangat tidak wajar untuk

proyek pemerintah skala besar," ujarnya.

Menurutnya, para pekerja juga nampak tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Hal ini dinilai rentan menimbulkan kecelakaan kerja.

Lebih jauh, GNPK-RI turut mempertanyakan kehadiran konsultan pengawas proyek. "Kami tidak melihat adanya konsultan pengawas yang aktif di lapangan. Jika pun ada, jangan sampai hanya formalitas atau tidak kompeten. Fungsi pengawasan sangat penting untuk menjamin kualitas pekerjaan," tegas Zaenuri.

Ia menambahkan, proyek pemerintah idealnya

melibatkan kontraktor lokal untuk memudahkan kontrol dan mengoptimalkan dampak ekonomi masyarakat sekitar.

"Jika dikerjakan pihak luar daerah, pengawasan menjadi sulit. Selain itu, proyek daerah seharusnya memberi manfaat ekonomi kepada warga lokal," katanya.

GNPK-RI Pekalongan Raya memastikan akan segera melakukan koordinasi dengan p i m p i n a n G N P K - R I Provinsi Jawa

Tengah guna mendalami temuan tersebut.

"Kami berharap pembangunan SMA Negeri 2 Kota Pekalongan dapat berjalan sesuai rencana,

tepat mutu, dan tepat waktu demi kemajuan pendidikan. Pendidikan adalah pilar kemajuan bangsa," pungkasnya.

(Dikin)



## Warga Watussalam Buaran Geruduk Balai Desa, Terkait Dugaan Korupsi DD Tahun 2019-2025



Kepala Desa Watussalam Heru Dwi Anto didampingi Polsek Buaran menjelaskan ke warganya.

**PEKALONGAN, BN** - Puluhan warga Desa Watussalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, mendatangi balai desa pada Jumat (7/11/2025) siang untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan program dan dana desa sejak tahun 2019.

Aksi tersebut difasilitasi langsung oleh pihak Kecamatan Buaran dan Polsek Buaran agar berjalan tertib. Dalam pertemuan itu, warga bertatap muka dengan Kepala Desa Watussalam, Heru Dwi Anto, untuk meminta penjelasan serta bukti dokumen resmi, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) hingga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) periode 2019-2024.

Sejumlah warga menilai, berbagai program desa seperti ketahanan pangan, peternakan, pengelolaan kafe, hingga pembangunan dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) dinilai tidak jelas pelaksanaannya. Mereka juga menyoroti minimnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

"Warga hanya dengar ada program peternakan sapi, kambing, lele, sampai kafe desa. Tapi hasilnya tidak pernah terlihat. Tidak ada sosialisasi, tidak ada keterbukaan," ujar Yusuf, salah satu warga.

Yusuf menambahkan, pembangunan dapur MBG di atas



Warga Watussalam Buaran saat Geruduk Balai Desa menanyakan dugaan korupsi DD Tahun 2019-2025. (dikin)

tanah bengkok desa dilakukan tanpa musyawarah, sehingga menimbulkan tanda tanya di kalangan warga.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Watussalam Heru Dwi Anto menjelaskan, pembangunan dapur MBG dilakukan dengan cepat karena adanya batas waktu dari pihak pengelola. Ia mengakui bahwa proses administrasi dan perjanjian sewa lahan baru akan dilengkapi setelah bangunan berdiri.

"Kami sudah sarankan agar pihak pengelola mengurus izin dan surat perjanjian sewanya. Sekarang kami sedang menyiapkan semua data agar bisa dijelaskan ke warga," kata Heru.

Heru juga membantah adanya program peternakan sapi yang disebut warga tidak terealisasi. Menurutnya, program yang ada adalah ketahanan pangan berupa ternak ayam dan kambing, dan sudah dijalankan.

Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Pekalongan dikabarkan tengah menelusuri dugaan penyimpangan dana desa Watussalam. Warga berharap hasil pemeriksaan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan ke depan.

Pertemuan lanjutan antara warga dan pihak desa dijadwalkan usai salat Jumat dengan agenda pembahasan dokumen RKP dan LPJ tahun 2019-2024. (dikin)



# Bupati Asahan Hadiri Panen Raya Jagung di Tinggi Raja

## □ Pemerintah Teguhkan Komitmen Kemandirian Pangan Daerah



Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., saat menghadiri Panen Raya Jagung di Tinggi Raja. (tp)

ASAHAN, BN - Suasana penuh semangat mewarnai kegiatan panen raya jagung di Desa Teladan, Kecamatan Tinggi Raja. Para petani bersama keluarga besar Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Asahan memanen hasil kerja keras mereka dengan penuh rasa syukur. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., yang hadir memberikan dukungan langsung sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program Food Estate sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Ketua Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Asahan,

Anda Suhendra Rambe, S.H., menyampaikan bahwa organisasi yang baru berusia sembilan bulan ini telah terbentuk di 25 kecamatan dan terus berkembang. Ia menegaskan komitmen Tani Merdeka untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat gerakan kemandirian pangan nasional berbasis pertanian modern di tingkat akar rumput.

Dalam arahnya, Bupati Asahan mengapresiasi semangat para petani yang mampu memanfaatkan lahan secara produktif melalui pola tanam jagung terpadu. Ia menegaskan bahwa capaian ini sejalan dengan kebijakan RPJMD Asahan 2025-2030, yang menempatkan sektor pertanian sebagai tulang

punggung perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus mendukung petani melalui penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, alsintan, serta pembukaan akses pasar dan kemitraan industri.

Sementara itu, Ketua Harian DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Misbah, mengapresiasi kesungguhan Pemkab Asahan dalam mendampingi petani. Ia menilai sinergi pemerintah dan masyarakat seperti ini menjadi kunci agar program pertanian nasional benar-benar berdampak hingga ke desa. "Asahan memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan strategis di Sumatera Utara," ujarnya.

(T.P)

# Pemkab Beltim Renovasi Rumah Janda



Rumah janda Endah Loviana setelah direnovasi

MANGGAR, BN - Setiap memasuki musim penghujan biasanya menjadi momok menakutkan bagi Endah Loviana (33). Betapa tidak, kondisi atap dan dinding rumahnya yang bolong-bolong membuat banyak air hujan menetes dari atap atau masuk dari sela-sela dinding rumah.

Kondisi rumah warga Desa Mengkubang Kecamatan Damar tersebut memang jauh kesan layak.

Malah bisa dibilang lebih mirip bekas gudang ketimbang hunian untuk ditinggali.

Atap seng yang sudah mengarat, ditambah dinding papan yang dimakan rayap. Di beberapa bagian terlihat papannya pun sudah terlepas, sehingga terpaksa diganti dengan bekas baleho atau spanduk. Lantainya pun sama, tidak semua tertutupi oleh semen, hanya beralaskan tanah hitam. Bahkan yang lebih memprihatinkan, tiang penyangga rumahnya miring, layaknya SD Laskar Pelangi dalam Novel Andrea Hirata.

"Memang dak layak pak rumah itu, hampir roboh, papan papannya pun banyak terbongkar. Bukan hanya pas hujan, pas terik pun sinar matahari masuk dari seng serta dindingnya," ungkap Endah saat Tim dari Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUKPR2RKP) bersama Diskominfo Beltim bertandang ke rumahnya, Rabu (22/10/25).

Namun bagi janda satu anak ini, dia tak ada pilihan lain selain harus menempati rumah yang tidak layak tersebut. Sejak ditinggal suaminya empat tahun lalu, Endah harus jadi tulang punggung keluarga.

Endah pun bekerja sebagai tukang bersih-bersih, upah bulanan yang diterima jauh dari cukup. Untuk menambah kebutuhan sehari-hari, dia harus kerja serabutan, seperti menjadi buruh tani menanam sayuran atau memanen hasil kebun. "Jangankan untuk memperbaiki rumah, untuk makan sehari-hari pun pas-pasan. Apalagi anak saya harus sekolah di PLB, kadang pas masih rumah dulu, takut ninggal anak sendirian di rumah, kalau ada apa-apa," ujar Endah.

Beruntung Endah terpilih menjadi salah penerima manfaat Bantuan Sosial bagi Individu Program Bantuan Stimulan Rumah DPUKPR2RKP Kabupaten Beltim. Dengan program prioritas pembangunan Pemkab Beltim ini, dia menerima Rp60 juta untuk pembangunan rumah baru. "Dari bantuan itu, Rp45 juta aku gunakan untuk beli bahan bangunan, sisanya Rp15 juta untuk upah buruh. Alhamdulillah sekarang saya dengan anak sudah tinggal di rumah yang jauh lebih layak," ucap Endah.

Sejak awal Oktober 2025 lalu, rumah Bansos Bantuan Sosial Program Bantuan Stimulan Rumah tersebut telah didiami Endah dan anak. Dia pun berterima kasih atas perhatian dan kepedulian Pemkab Beltim atas kebutuhan warga seperti dirinya.

"Terima kasih Pak Bupati dan jajaran yang sudah mau membantu. Semoga program ini dapat terus berjalan, agar warga yang kurang beruntung seperti saya dapat merasakan manfaatnya," harap Endah. (diskominfobeltim/as)

# Pemkab Asahan dan BPS Tandatangani MoU Pemutakhiran Data DTSEN

ASAHAN, BN - Pemerintah Kabupaten Asahan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan terkait kerja sama pemutakhiran Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN). Penandatanganan berlangsung di Ruang Kerja Rumah Dinas Bupati Asahan dan disaksikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, Sekretaris Bapperida, serta jajaran BPS Asahan. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat sistem data daerah yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kepala BPS Kabupaten Asahan Dadan Supriadi menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi data antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Asahan. Melalui MoU ini, BPS mendapatkan mandat untuk memberikan pendampingan dalam pemutakhiran data DTSEN serta memastikan kualitas dan validitas data sektoral di Asahan. Ia juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 4,62%, menempatkan Asahan di posisi kelima se-Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, Kepala BPS juga menyampaikan Indeks Strategis Terkini Kabupaten Asahan, yang mencakup capaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan,



Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan terkait kerja sama pemutakhiran Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN). (tp)

ketimpangan pendapatan, serta perkembangan inflasi daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih terukur.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. menyampaikan apresiasi atas dukungan BPS dalam menyediakan data yang akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah. Beliau menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menjadikan data BPS sebagai rujukan utama dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan. "Kami patut bersyukur atas pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Dalam membangun daerah, kami selalu berpedoman pada data yang valid dan terukur," ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya pemanfaatan data BPS dalam perencanaan sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. "Kami ingin mempersiapkan generasi Asahan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Karena itu, kami akan membangun sekolah berkualitas dengan mengacu pada data BPS," tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menandatangani Surat Dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, sebagai bentuk komitmen kuat Pemkab Asahan dalam mendukung agenda statistik nasional. (T.P)

# 37 Pengurus FORKI Beltim Resmi Dilantik

DAMAR, BN - Kepengurusan baru FORKI Beltim periode 2025-2029 resmi dilantik di GOR Dispura Damar, Kamis (30/10/2025). Sebanyak 37 pengurus dikukuhkan untuk memperkuat struktur organisasi dan sistem pembinaan karate di daerah.

Ketua FORKI Beltim terpilih, Dedi Septiadi menyampaikan bahwa amanah kepengurusan yang diterimanya merupakan tanggung jawab besar untuk membawa FORKI menjadi organisasi yang solid, profesional, dan berprestasi. "Kami akan mendorong sertifikasi pelatih dan wasit, meningkatkan sarana latihan, serta menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, KONI, Dinas terkait, dan seluruh perguruan karate," jelasnya.

Dedi juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih adaptif dalam memperkenalkan karate kepada generasi muda. "Minat remaja hari ini banyak terserap ke dunia digital. Karena itu, pendekatan pembinaan harus ikut bertrans-



Wabup Beltim Khairil Anwar saat berikan sambutan Pembukaan karate dan Pelantikan FORKI beltim. (ist)

formasi. Kita akan membawa karate lebih dekat dengan sekolah, komunitas pemuda, serta memanfaatkan media dan kegiatan kreatif yang relevan dengan mereka," ujar Dedi.

Sementara itu, Wakil Bupati Beltim Khairil Anwar menyampaikan bahwa karate tidak hanya berperan dalam peningkatan prestasi, tetapi juga pembentukan disiplin dan sportivitas generasi muda.

"Karate bukan hanya persoalan teknik fisik, tetapi membangun sikap hormat, keberanian, dan tanggung jawab. Nilainya inilah yang harus terus diperkuat melalui organisasi yang solid dan pembinaan yang konsisten," ujar Khairil.

Ia menegaskan Pemkab Beltim siap mendukung jalannya program pembinaan bersama perguruan dan sekolah. "Kami mendorong FORKI untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, sekolah, komunitas, dan pelatih. Kolaborasi inilah yang akan melahirkan pembinaan yang berkelanjutan," tambahnya. (diskominfobeltim/as)

# Wakil Bupati Asahan Pimpin Apel Hari Sumpah Pemuda ke-97



Upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97. (ist)

ASAHAN, BN- Semangat persatuan dan kebangkitan generasi muda kembali mengemuka di Halaman Kantor Bupati Asahan saat Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., memimpin Apel Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025. Mengusung tema "Pemuda Bergerak, Indonesia Bersatu", apel berlangsung khidmat dan penuh makna dengan

penampilan peserta upacara yang mengenakan pakaian adat dari 14 etnis yang hidup berdampingan di Kabupaten Asahan — menegaskan jati diri daerah sebagai miniatur kebhinekaan Indonesia.

Apel ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan, antara lain Kajari Asahan, perwakilan Ketua DPRD, Dandim 0208/AS, perwakilan Danlanal Tanjung Balai Asahan, dan perwakilan Kapolres Asahan. Hadir pula Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik, Staf Ahli PKK Kab Asahan Ny Juni Riant beserta jajaran, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, para Kabag di lingkungan Setdakab Asahan, serta ASN, pelajar, organisasi kepemudaan, ormas, dan perwakilan pemuda lintas etnis.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga yang menegaskan bahwa semangat pemuda 1928 harus terus menyala di dada generasi masa kini. "Mereka dulu tidak banyak bicara, tetapi berani bersumpah dan menepatinya dengan darah dan nyawa. Kini tugas kita berbeda, bukan lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Semangatnya tetap satu: Indonesia tidak boleh kalah," ujar Rianto.

Usai amanat, pernyataan ikrar Pemuda Indonesia dikumandangkan oleh perwakilan organisasi kepemudaan dan diikuti dengan lantang oleh seluruh peserta apel. Suasana haru dan bangga menyelimuti upacara ketika bendera Merah Putih dikibarkan diiringi lagu Indonesia Raya dan Satu Nusa Satu Bangsa. Para pemuda dari berbagai organisasi berdiri tegap di bawah langit Asahan, mencerminkan tekad untuk menjaga persatuan dan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa.

Menutup amanatnya, Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan untuk terus mendukung program dan kegiatan kepemudaan di bidang pendidikan, kewirausahaan, serta pengembangan potensi generasi muda. "Pemuda Asahan harus menjadi pelopor perubahan positif — generasi yang tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan nilai budaya serta kearifan lokal," pungkasnya. (T.P)

# Badan Bank Tanah Percepat Reforma Agraria di Kecamatan Gantung Beltim



Wabup Beltim Khairil Anwar

atkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.

Luasan lahan tersebut seluruhnya berada di Kecamatan Gantung. Di Desa Selinsing luasan lahan mencapai 1.261 hektare, sedangkan 969 hektare berada di Desa Jangkar Asam dan Lim-

bongan.

Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan. Hal ini dilakukan melalui penataan aset seperti redistribusi tanah dan penataan akses terhadap sumber daya agraria untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kemakmuran, serta mendukung ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.

"Jumlah itu berdasarkan hasil penetapan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kedatangan kita ke sini untuk mempercepat proses reforma agraria," kata Kepala Divisi Reforma Agraria BBT, Muji Martopo usai Koordinasi Kegiatan Reforma Agraria di Bidang Tanah HPL BBT Kabupaten Beltim di Ruang Rapat Bupati, Kamis (6/11/25).

Untuk tahap awal ini BBT akan mengejar pelaksanaan Reforma Agraria pada lahan seluas 378 hektare di Desa Selinsing. Namun

luasan lahan yang direforma agraria akan mengalami penambahan dari waktu ke waktu sesuai dengan alokasi Reforma Agraria pada HPL BBT. "Kita sudah masuk di Desa Selinsing, mulai Senin kemarin, kalau data sudah siap makin cepat makin baik. Jadi tanah itu akan kita serahkan kembali kepada masyarakat, merekalah yang akan menggarapnya," ungkap Muji yang didampingi stafnya, Firas Afif.

Muji menjelaskan mekanismenya akan mengembalikan lahan kepada masyarakat yang sudah menguasai dan menggarap. Sekiranya berada di area HPL atau Hak Pengelolaan atas lahan negara, BBT akan berkolaborasi dengan tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

"Setelah itu akan ditetapkan oleh Bupati Beltim sebagai subyek. Nanti kita ajukan untuk sertifikat bagi masyarakat. Baik Pemda, Pemerintah Kecamatan dan Desa sangat mendukung program ini," ujar Muji. (diskominfobeltim/as)

## Ketua DPRD Kab Bogor Sastra Winara, Pimpin Rapat Paripurna Bahas Raperda Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

BOGOR, BN - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara, Gelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Rapat tersebut membahas penyampaian dan tanggapan terhadap beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), acara berlangsung di ruang rapat DPRD, Selasa, (21/10/2025).

Di antaranya, Raperda Kabupaten Bogor tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang disusun untuk menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah dengan dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan wilayah, dan kompleksitas urusan



Ketua DPRD Kab Bogor Sastra Winara (Kanan), Bupati Bogor (Kiri). (eml)

pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan responsif.

Selanjutnya, Raperda Kabupaten Bogor tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, yang bertujuan menciptakan Kabupaten Bogor yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan disiplin dalam perilaku masyarakat.

Hadir dalam kegiatan Rapat Paripurna, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bogor, Dirut RSUD, Dirut BUMD, dan jajaran terkait lainnya. (eml)

## Bupati Bogor Apresiasi Kementerian LH Dukung Pelestarian Kawasan Puncak dan Bogor Selatan

BOGOR, BN - Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah pusat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung program penghijauan di wilayah Bogor Selatan, Selasa, (28/10/25)



Bupati Bogor Rudy Susmanto (Tengah pakai topi). (eml)

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Lingku-

ngan Hidup atas dukungan nyata terhadap pelestarian kawasan Puncak dan wilayah Bogor Selatan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian tidak tinggal diam, tetapi hadir untuk memastikan wilayah Bogor Selatan, khususnya Puncak, tetap lestari," ujar Rudy Susmanto. (eml)

## Program Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk SDN Sukatali, Dikebut

SUMEDANG, BN - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar telah mengucurkan dana APBN Tahun 2025 untuk SDN Sukatali di Wilayah Kecamatan Situraja Sumedang, untuk merehab ruang kelas yang dianggap rusak perlu direhab. Program ini merupakan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025.

Saat dikonfirmasi Carca, S.Pd selaku Kepala Sekolah pada hari Jum,at 30 Oktober 2025 di Ruang kerjanya menjelaskan, bahwa Jumlah Dana yang terkucur untuk Rehab Sekolah kami sebesar Rp.589.550.384,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Berdasarkan kebutuhan sesuai dengan rencana biaya



Revitalisasi SDN Sukatali masih dikerjakan. (ernawan)

yang akan dialokasikan untuk merehab ruang kelas sejumlah 6 lokal, namun bagian atas akan diganti gentingnya sepaket dengan rangkanya baja ringan. Pelaksana di lapangan menjelaskan pula bahwa kami akan bekerja keras karena mengejar target dalam kurun waktu hanya 50 hari kalender harus sudah selesai.

Ditambahkan Kepala Sekolah terkait kondisi sekolah saat ini memang memerlukan rehab maka tepat sekali Pemerintah Pusat mengucurkan Dana untuk tahapan kami Kabupaten Sumedang hanya mendapat bagian satu sekolah pas di SDN Sukatali, namun sebelumnya banyak sekolah lain yang mendapat Program yang sama. (Ernawan)

## Pemkab Pinrang Komitmen Layanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

PINRANG, BN- Upaya menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan terus menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Pinrang. Hal ini diwujudkan dengan menjalin kerja sama lintas sektor, baik dari pihak internal maupun eksternal, guna memperkuat sistem layanan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar Forum Komunikasi Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di ruang rapat Wakil Bupati Pinrang, Senin (3/11/2025)

Forum ini menjadi wadah koordinasi antara Pemkab Pinrang dan BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas.

Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bung, S.IP., M.Si., dalam arahnya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.



Pemkab Pinrang bersama BPJS Kesehatan menggelar Forum Komunikasi Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di ruang rapat Wakil Bupati Pinrang. (ist)

menjaga kualitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama seluruh elemen Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemkab Pinrang akan terus mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi yang berpihak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang drg. Dyah Puspita Dewi, M.Kes., menyampaikan harapannya agar Pinrang tetap mampu mempertahankan capaian UHC di tengah tantangan keterbatasan anggaran.

"Kami berharap sinergi ini dapat terus terjaga agar masyarakat tetap mendapatkan haknya atas layanan kesehatan yang bermutu," ungkapnya. (\*sabit)

## Direktur Perumda AMWM Bone Persilahkan Investor Tanamkan Saham di Bone



Direktur Perumda AMWM Bone, Muh. Bachtiar Sairing. (ist)

BONE, BN - Direktur Perumda Wae Manurung Bone Muh.Bachtiar Sairing, S.Sos menyiapkan langkah strategis bagi investor untuk menanam saham di Bone demi kemajuan pengelolaan air minum yang bersih untuk masyarakat Kota Beradab.

Direktur Perumda AMWM Bone, Muh. Bachtiar Sairing, terus melakukan konsolidasi sesama Pemerintah daerah untuk ketertarikan investor untuk menanamkan modal di Bone.

"Konsolidasi beberapa investor, Bapak Bupati Bone merespons positif hal tersebut. Menurut beliau, kerja sama ini bisa menjadi solusi pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat yang selama ini masih belum tercukupi," ucap Bachtiar.

Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, dengan tegas menyatakan pihaknya menyambut baik peluang kerja sama pengembangan sistem penyediaan air minum.

Semoga berjalan lancar dan secepatnya akan selesai dengan waktu tidak lama, Ia menilai rencana ini dapat memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan kinerja Perumda AMWM Bone dan ini akan menambah pendapatan dan keuntungan," tegasnya. (Suspi/ red)

## GAM Kepung Kejari Makassar, Tuntut Keadilan dan Pembebasan Aktivis



Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivistis Mahasiswa (GAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Makassar.

MAKASSAR, BN- Para mahasiswa membentangkan spanduk putih bertuliskan "AKTIVIS BUKAN PENJAHAT, BEBASKAN KAWAN KAMI" dan menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya, menghapus seluruh tuntutan terhadap aktivis yang dituduh sebagai dalang kerusuhan 29 Agustus 2025, serta mendesak Polda Sulsel untuk bertanggung jawab atas dugaan pembiaran terhadap kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya Gedung DPRD.

Para demonstran menilai bahwa proses hukum yang dijalankan terhadap para aktivis sarat dengan kriminalisasi. Penegakan hukum seharusnya berpihak pada kebenaran dan keadilan, bukan menjadi alat untuk membungkam suara kritis aktivis.

Jenderal Lapangan, Darwis menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap para aktivis merupakan bentuk kekeliruan hukum.

"Penetapan status tersangka terhadap para aktivis dan pemuda tersebut dinilai keliru dan tidak berdasar hukum. Sebab, mereka bukan pelaku pembakaran

maupun perusakan fasilitas umum, melainkan bagian dari gerakan nurani yang murni menyuarakan kebenaran," tegas Darwis

"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan pada saat itu merupakan ekspresi politik yang sah, lahir dari kekecewaan mendalam terhadap ketidakadilan, serta merupakan bentuk penyampaian aspirasi rakyat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945." Lanjutnya

Di waktu yang sama, Panglima GAM (La Ode Ikra Pratama) menegaskan bahwa Polda Sulsel lebih Bertanggung jawab atas peristiwa Kerusuhan 29 Agustus 2025.

"Peristiwa 29 Agustus di Makassar menorehkan sejarah kelam. Betapa tidak, Kerusuhan yang terjadi di tengah kota menimbulkan kerusakan fasilitas bahkan ada korban jiwa. Sayangnya, Polda Sulawesi Selatan tampak membiarkan situasi tersebut berkembang tanpa pengendalian yang efektif," ucapnya

Menjelang akhir aksi, massa melakukan mediasi dengan pihak Kejari Makassar. Kasi Pidsus Kejari Makassar, Arifuddin A, menyampaikan bahwa pihaknya akan menjalankan proses hukum secara transparan terkait tuntutan terhadap tersangka aktivis yang diduga sebagai dalang dalam kerusuhan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. (red/sabit)

## Kajari Pinrang Sulsel Resmi Berganti



Kajari Pinrang yang baru dilantik Sinrang, S.H., M.H., menggantikan pejabat lama Agung Bagus Kade Kusimantara, S.H., M.H. (ist)

PINRANG, BN - Setelah pelantikan sejumlah pejabat di lingkup Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beberapa hari lalu, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pinrang kini diemban oleh Sinrang, S.H., M.H., menggantikan Agung Bagus Kade Kusimantara, S.H., M.H., yang kini mendapat amanah baru sebagai Kajari Jepara.

Sebagai bentuk penghargaan dan silaturahmi, Pemerintah Kabupaten Pinrang menggelar acarapisah sambut Kajari Pinrang di Pendopo Rumah

Jabatan Bupati Pinrang, Sabtu (1/11/2025). Dalam sambutannya, Bupati Pinrang H. A. Irwan Hamid, S.Sos menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan sinergitas yang telah ditunjukkan Agung Bagus selama menjabat sebagai Kajari Pinrang.

Menurut Bupati Irwan, kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan selama masa kepemimpinannya telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Sinergitas yang telah terbangun antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Negeri Pinrang memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan rasa keadilan dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai aturan," ujar Bupati Irwan.

Bupati Irwan juga menyampaikan doa dan harapan agar Agung Bagus terus sukses di tempat tugas yang baru serta tetap menjaga silaturahmi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Pinrang. Kepada Kajari yang baru, Sinrang, S.H., M.H., Bupati Irwan berharap agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan terus melanjutkan sinergitas yang telah terjalin dengan baik. "Harapan kami, kerja sama yang kuat antara Pemkab Pinrang dan Kejaksaan dapat terus berlanjut demi menjaga kondusivitas daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bung, S.I.P., M.Si., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah A. Calo Kerrang, Ketua TP PKK Kabupaten Pinrang Sri Widiati A. Irwan, serta sejumlah kepala OPD, camat, dan undangan lainnya. (\*sabit)

## Uu Kusmana Dilantik Sekda, Siap Bawa Kuningan "Melesat"

KUNINGAN, BN - Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., resmi melantik Uu Kusmana, S.Sos., M.Si. jadi Sekretaris Daerah (Sekda), yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (6/11/2025), di Teras Pendopo.

Pelantikan tersebut disaksikan oleh Wakil Bupati Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kabupaten Kuningan, para kepala SKPD, camat, jajaran Dharma Wanita Persatuan, serta pengurus PKK.

Dalam arahnya Bupati Dian menegaskan, bahwa pelantikan ini

bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi peralihan amanah besar untuk memimpin birokrasi daerah. Pak Uu Kusmana bukan hanya menempati jabatan administratif, tetapi juga memikul amanah besar sebagai pemimpin tertinggi ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan," ujar Bupati Dian.

Ia menekankan bahwa Sekda harus menjadi "pelita" bagi seluruh ASN dan menjadi dirigen pembangunan yang mampu mengharmoniskan kerja antar perangkat daerah.



Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., saat melantik Uu Kusmana, S.Sos., M.Si. jadi Sekda. (ed)

# Desa Ngoro Digelontor Dana Desa Rp 1.026 Miliar



PASURUAN, BN - Pemerintah Pusat melalui pemerintah daerah kembali menggelontor Dana Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Rp.1.026.250.000. Anggaran itu mengalami kenaikan sebesar Rp.88.259.000 atau 77,07% dibanding tahun 2024 yang hanya mendapat

Rp.937.991.000

Tentu kenaikan Dana Desa Ngoro ini patut disambut gembira warga masyarakat Desa Ngoro, lantaran membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, ketahanan ekonomi, dan pemberdayaan UMKM guna

mewujudkan kesejahteraan segenap warga desa Ngoro.

Berdasarkan informasi, data dan/atau dokumen yang di terima Redaksi BIDIK NASIONAL, Pemerintah Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.026.250.000 dengan realisasi penyaluran pertanggal 23 Oktober 2025 sebesar Rp.615.750.000. Angka penyaluran tersebut sangat dimungkinkan mengalami kenaikan penyerapan seiring dengan realisasi penggunaan yang berakhir pada Desember mendatang.

Belum diketahui secara pasti uraian kegiatan yang di anggarkan melalui Dana Desa Ngoro Kecamatan

Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 tersebut, mengingat informasi yang di dapat Redaksi BN sangat dimungkinkan mengalami perubahan pada system.

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka, partisipatif, transparan dan akuntabel menjadi penting Redaksi BIDIK NASIONAL menjalankan fungsi kontrol atas penggunaan Dana Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dengan: mengajukan permohonan konfirmasi ke kepala desa Ngoro. Hak jawab dan klarifikasi bisa menghubungi redaksi BN 08123209649 atau email: bidiknasional@yahoo.com. (Toddy/Lipsus)

## Jl Sukajadi - Sindang Anom Diaspal, Dana Banprov Jabar Tahun 2025

SUMEDANG, BN - Pembangunan di Desa Sukajadi Kecamatan Wado Sumedang sedang berjalan Anggaran yang diterapkan dari Dana Banprov Tahun 2025 sebesar Rp 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang didanai untuk pengaspalan Jalan yang menghubungkan Jalan Sukajadi ke Sindang Anom sepanjang 450 meter dengan lebar 2,5 meter dengan ketebalan 3 Cm.

Kepala Desa Sukajadi Ade Mamat saat ditemui Senin 27 Oktober 2025 di ruang kerjanya mengatakan, renovasi pengaspalan jalan yang menghubungkan Jl. utama Sukajadi ke Dusun Sindang Anom ini telah mempercayakan TPK di lapangan. "Kami hanya monitor saja. Perbaikan jalan ini sebenarnya memang betul dan harus tahun ini ada perbaikan karena masyarakat sudah lama menunggu perbaikannya jadi mereka merasa gembira dengan adanya perbaikan jalan ini," ujar Ade.



Jl Sukajadi - Sindang Anom saat diaspal.

"Perlu kami sampaikan di sini bahwa jalan ini merupakan jalan hidup bagi masyarakat kami, karena disamping jalan akses atau dapat juga dikatakan Jalan Usaha Tani yang bisa menghubungkan Sukajadi ke Sindang Anom, juga setiap harinya banyak sekali para petani yang biasa mengolah sawah maupun ladang menggunakan kebanyakan jalan ini, sehingga apabila tidak segera diperbaiki ekonomi mereka terutama dari hasil pertanian di Sukajadi akan terhambat," tegasnya.

Ade Mamat saat dikonfirmasi mengatakan, pekerjaan yang diterapkan kepada rehab jalan ini merupakan hasil musyawarah ketua RT, RW, BPD Tokoh masyarakat dan semua perangkat yang juga turut hadir Babinsa, Babinkamtibas, "Kami tidak mau pekerjaan ini Sebagai Kepala Desa yang ujung ujungnya disalahkan sehingga nampaklah hasil pekerjaan pembangunan fisik jalan ini," pungkaskannya. (Ernawan)

## Dinas PUPR Jombang ...

diberikan oleh Dinas PUPR khusus kepada wartawan, ini kelihatannya ada rasa sentimen kepada wartawan tersebut.

Ini menunjukkan Satpam Dinas PUPR Jombang "Over-acting", merujuk pada perilaku satuan pengamanan (Satpam) yang bertindak berlebihan, di luar batas kewenangannya, atau bersikap arogan saat menjalankan tugas.

Perilaku ini seringkali menimbulkan konflik atau kesalahpahaman dengan masyarakat, tamu, wartawan, pihak lain yang berinteraksi dengannya. Menegur atau memberlakukan orang yang bukan warga, atau tamu dengan cara yang tidak pantas.

Melarang pihak yang berhak, seperti wartawan yang sedang meliput, konfirmasi dengan pejabat setempat untuk memasuki area publik atau acara yang seharusnya terbuka. Alih-alih menciptakan rasa aman, perilaku ini justru menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman di lingkungan kerja.

Agar lebih dipahami oleh Dinas PUPR Jombang, untuk menghindari perilaku Satpam nya yang over acting,

Sambungan hal 3

seharusnya berdasarkan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang berlaku, menjunjung tinggi kode etik profesi dan mengutamakan pendekatan yang humanis, tegas dan sopan dalam menjalankan tugas.

Dampak dan Konsekuensi perilaku satpam yang over acting dapat menyebabkan beberapa konsekuensi negatif, diantaranya, menciptakan kesan negatif terhadap Dinas PUPR Jombang atau instansi tempat satpam tersebut bekerja. Sementara di lingkungan Dinas PUPR Jombang menyenalkan atas adanya Satpam Outsourcing tersebut, "Tidak ada gunanya, sebenarnya kerjanya apa sih, tidak usah diadakan satpam, pegawai honor yang disuruh jaga depan itu ditambah gajinyakan sama saja, adanya Outsourcing Satpam mau tidak mau Dinas PUPR sebenarnya mumet, gaji honorer saja sudah berapa, seharusnya tidak usah memakai satpam segala, itu yang enak yang punya Outsourcing, kepala dinasnya manut aja, kepalanya ya mumet." ujar salah satu pegawai honorer di Dinas PUPR yang enggan menyebutkan namanya. (Tok)

Sambungan hal. 3

## Ketua LP3 Sapujagad ...

kebutuhan sehari-hari," ujar Alim.

"Bukanya saya iri dengan gaji dan berbagai macam tunjangan DPRD jombang, akan tetapi para anggota DPRD ini harus peka terhadap kondisi perekonomian masyarakat, belum lagi berbagai fasilitas daerah yang rusak dan butuh perhatian, baik jalan, jembatan, sekolah, sarana ibadah dan lain lain. Jadi harapan saya paling tidak tunjangan yang berlebihan harus dikurangi, intinya kami ingin Perbup Jombang No 66 tahun 2024 harus dievaluasi" tandas Alim.

Sejak tahun 2026, lanjutnya, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi harus dikurangi, sedangkan tunjangan yang

sudah diterima di tahun 2025 ini secepatnya harus di audit investigatif ke BPK, meskipun secara rutinitas BPK mempunyai tugas menjalankan fungsi sebagai auditor, tetapi untuk permasalahan kali ini mari kita kawal bersama sama dan paling tidak kita harus tahu laporan Hasil Pemeriksaannya.

"Apabila ditemukan nilai berlebihan maka wajib hukumnya bagi para anggota DPRD Jombang untuk mengembalikan," tegasnya.

"Beberapa waktu yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan ketua DPRD Jombang (Hadi Atmadja) beliau secara pribadi setuju kalau dikurangi, cuma secara kelembagaan beliau tidak bisa mengambil keputusan, nanti akan di mu-

syawarakan ke semua anggota," jelasnya.

"Secara resminya saya juga sudah berkirim surat permohonan evaluasi ke Bupati Jombang, Ketua DPRD Jombang dan ke Gubernur Jawa Timur, kita tinggal tunggu hasilnya saja, mudah mudahan ada tanggapan yang positif, seandainya tidak ada tanggapan dan respon yang positif, ya kita akan ajukan ke Yudisial review ke MA (Mahkamah Agung), kalau menurut saya mengalah demi kebaikan Masyarakat akan lebih baik daripada hidup senang di atas penderitaan masyarakat" tambah Alim.

Menurut Nanang Bareta salah satu tokoh / warga wilayah kecamatan Megaluh, Jombang, ia prihatin dengan tunjangan yang di

terima DPRD Jombang," Jika aturan tersebut merupakan suatu hak dan kewajiban untuk anggota DPRD Jombang, maka seyogyanya itu di jalankan sesuai dengan peruntukannya, maka harus ada panisme jika tidak dilakukan sesuai keharusan nya dengan di hentikan nya tunjangan sewa rumah tersebut" ujarnya.

"Kembalikan ke peraturan saja, biar tidak menjadi sebuah perdebatan atau opini masyarakat terkait hal tersebut, apalagi kondisi saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, di kembalikan aja tunjangan tersebut, dan untuk tahun 2026 supaya di hentikan saja tunjangan itu, bisa di manfaatkan untuk kebutuhan masyarakat Jombang yang masih kekurangan," ujar Nanang Bareta. (Tok)

Sambungan hal. 3

## DPRD Pamekasan ...

dan menyelenggarakan sidang paripurna dengan agenda tahunan tersebut. "kami bersama segenap anggota DPRD Pamekasan merasa bangga dan cinta terhadap pembangunan dan budaya, agama, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat pamekasan yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur nenek moyang yang telah mendirikan kabupaten pamekasan yang kita cintai ini".

Dalam sambutannya bupati Pamekasan Dr Kholilurrahman SH, Msi menyampaikan sangat mengapresiasi sekali capaian penghargaan yang telah di dapat oleh pemerintah kabupaten Pamekasan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah selama kurun waktu yang cukup lama. maka dengan momentum peringatan hari jadi Pamekasan ke-495 tahun 2025 itu, pihaknya memiliki tekad

untuk lebih meningkatkan pembangunan di kabupaten Pamekasan. baik, di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, reformasi birokrasi maupun infrastruktur. Sehingga akan terwujud keinginan untuk memajukan kabupaten pamekasan yang lebih baik sesuai dengan tema yang di usung kali ini yakni "Pamekasan Kreatif dan Maju". Oleh sebab itu, pihaknya mengajak semua elemen masyarakat agar saling bahu-membahu, bergotong royong serta harmonis untuk membangun kabupaten pamekasan tersebut.

"Kami atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan mengucapkan selamat hari jadi pamekasan ke-495 tahun 2025, semoga pembangunan di kabupaten pamekasan lebih baik dan maju," pungkaskannya.

# PN Sidoarjo Bakal Punya Gedung Baru Senilai Rp 29 Miliar



Bangunan Gedung Baru PN Sidoarjo masih dalam tahap pengerjaan. (teddy syah)

SIDOARJO, BN - Pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo di Jalan Gading Fajar, Sidoarjo Kota, hampir rampung. Pengerjaannya ditarget selesai sebelum tahun baru, meski penempatan diperkirakan baru bisa dilakukan akhir tahun depan. Pada BN, humas PN Sidoarjo, Irianto Prijatna Utama, menyampaikan bahwa progres pembangunan saat ini sudah mencapai 75 persen. Ia berharap pekerjaan fisik bisa tuntas pada pertengahan Desember. "Khusus untuk pengerjaan fisik, kami targetkan selesai Desember ini," ujar Irianto, Jum'at (7/11).

Setelah tahap pertama rampung, pembangunan akan berlanjut ke tahap dua. Fokusnya pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung. "Kemungkinan baru bisa dipakai pertengahan atau akhir 2026, tergantung tahap dua," jelasnya.

Gedung baru tersebut dibangun berdasarkan instruksi Mahkamah Agung (MA). Setiap pengadilan diwajibkan memiliki lahan minimal seluas 2.900 meter persegi. "Anggaran pembangunan bersumber dari APBN," ungkap Irianto.

Total dana untuk pengerjaan fisik mencapai Rp 29 miliar. Selain itu, disediakan biaya konsultan sebesar Rp 1 miliar dan biaya pengawasan senilai Rp 778 juta.

Irianto menambahkan, gedung baru PN Sidoarjo nantinya memiliki delapan ruang sidang. Jumlah itu lebih banyak dua ruang dibandingkan gedung lama di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Sidoarjo Kota. "Termasuk fasilitas ruang tunggu dan area parkir akan lebih luas," ujarnya.

Menurutnya, tambahan ruang sidang sangat dibutuhkan mengingat jumlah perkara yang ditangani PN Sidoarjo terus meningkat. (Teddy Syah)

## Dusun Setia Bakti Desa Sukatali Dihotmix Dari Dana Banprov Jawa Barat 2025

SUMEDANG, BM - Pekerjaan hotmix jalan lingkungan di Dusun Setia Bakti Desa Sukatali Kecamatan Situraja dengan kepanjangan 245 meter, lebar 3 meter ketebalan 3 cm yang dilaksanakan oleh TPK.



Jalan Dusun Setia Bakti nampak sudah di hotmix.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

## Jombang Fest ...

Sambungan hal 3

pameran Jombang Fest 2025 di Alun-Alun Jombang, Dinas Peternakan membuka layanan pemeriksaan kesehatan hewan serta konsultasi gratis bagi pemilik hewan. Antusias masyarakat juga tinggi, terlihat dari kuota layanan yang telah terpenuhi.

"Kami menampilkan Jombang melayani yang artinya Dinas Peternakan memberikan pelayanan pada para pemilik hewan kesayangan. Selama kegiatan kita akan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Alhamdulillah kuota sudah terpenuhi, antusiasnya luar biasa," ujarnya.

Tidak hanya fokus pada kesehatan hewan, Dinas Peternakan Jombang juga memanfaatkan momen ini untuk mengkampanyekan Gerakan Minum Susu dan Makan Telur. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dari protein hewani serta mendukung ketahanan pangan lokal.

"Untuk program gerakan minum susu dan makan telur juga kita sosialisasikan. Karena kami berharap warga masyarakat bisa memberikan dan menjaga populasi hewan ternak," ungkapnya.

Sehingga pada promosi itu tidak hanya berfokus pada konsumsi, tetapi juga dapat mendorong kepedulian masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan populasi hewan ternak yang sehat dan produktif. Sehingga partisipasi Dinas Peternakan Jombang pada Jombang Fest 2025 ini, diharapkan dapat menjadi upaya untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat.

"Sehingga kepedulian terhadap kesehatan hewan kesayangan dan ternak serta kesadaran akan gizi masyarakat dapat meningkat secara bersamaan, untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Jombang," ujarnya.

Karena itu untuk menjalankan tugas, dan fungsinya, dinas peternakan jombang yang berjalan sendiri, yang di dukung oleh pemerintah kabupaten jombang.

Sehingga dukungan dan harmonisasi dengan pemerintah dalam hal ini menjadi penting untuk mendukung dan mensukseskan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten Jombang. (Tok)

## LBH Ansor ...

Sambungan hal 5

KENDAL, BN - Kasus pengerooyokan oleh Oknum Ormas Grib terhadap pedagang UMKM di Kawasan Industri Kendal berbuntut panjang. Atas kejadian tersebut korban pengerooyokan Muslih didampingi LBH Ansor Jateng datang Polres Kendal guna meminta perlindungan hukum.

Adapun penerima kuasa korban adalah LBH Ansor Jawa Tengah dengan personil H. Mohtar Nurhadi Wibowo SH.M.H dari Kantor Wilayah Jawa Tengah, LBH Kendal Agus Sulis SH., Muhammad David SH, Ferhad Bizgovic Satha, dari Kabupaten semarang Solikul adam SH dan Al Badrul Munir Wibowo SH. MH.

Disela sela pendampingan korban di Polres Kendal Kuasa Hukum Muslih Al Badrul Munir Wibowo menyampaikan kepada awak media bahwa " Kami mewakili LBH Ansor Pimpinan Wilayah Jawa Tengah selaku kuasa hukum saudara Muslih salah satu pedagang UMKM yang berjualan di aera KIK. Kedatangan kami ke Polres Kendal adalah mendampingi korban untuk melakukan laporan atas dugaan penganiayaan dan pengerooyokan terhadap klien kami Bapak Muslih. Kami bersama saksi sebanyak 5 orang untuk memberikan ketetapan di unit yang menangani laporan kami," imbuhnya.

" Kami berharap kepada Polres Kendal bahwa laporan kami agar segera ditindak lanjut dengan cepat sesuai prosedur yang ada, siapapun pelaku pengerooyokan dan penganiayaan agar ditindak sesuai undang-undang yang berlaku," tegasnya.

Ditempat yang sama Ketua Paguyuban UMKM Muhamad Rohadi mengatakan, " Menindak lanjut kejadian yang menimpa salah satu pedagang UMKM di lingkungan KIK yang mengalami penganiayaan dan pengerooyokan maka kami selaku pengurus UMKM mendampingi korban untuk melakukan pelaporan dan meminta perlindungan hukum ke Polres Kendal," ucapnya.

"Kami didampingi oleh LBH Ansor Jawa Tengah, kami berharap Polres Kendal menindak tegas segala bentuk kekerasan dan premanisme," pungkaskannya. (Peni)

## Uu Kusmana ...

Sambungan hal 9

Sementara itu, Sekda yang baru dilantik, Uu Kusmana, menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk menjalankan amanah dan kepercayaan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, saya dilantik. Ini amanah berat, tapi insyaallah dengan dukungan seluruh ASN dan kepala SKPD, tugas ini " bisa dijalankan dengan baik," ujarnya.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjadi penggerak pemerintahan yang efektif dan kolaboratif, sejalan dengan visi Kuningan Melesat.

Dalam kesempatan itu, Uu juga sempat menceritakan perjalanan panjang kariernya. Ia mengaku tak pernah membayangkan menjadi pejabat tinggi, bahkan pernah melamar dengan ijazah SMP karena keterbatasan formasi saat itu.

Uu menyebut langkah awalnya sebagai Sekda adalah memperkuat kekompakan antar perangkat daerah. "Kita harus kompak, harmonis, dan guyub. Kalau solid, visi Kuningan Melesat bisa kita capai bersama," ujarnya. (Ed)

## KPK Ciduk...

26 Februari 1971. Dia menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang pascasarjana di Universitas Dr. Soetomo Surabaya dan meraih gelar Magister pada 2014.

Karier politiknya dimulai di tingkat legislatif sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2009–

2014. Kemudian dia kembali dipercaya untuk melanjutkan tugas pada periode berikutnya, 2014–2015.

Pada Pilkada 2020, ia memenangkan kontestasi dan dilantik sebagai Bupati Ponorogo untuk masa jabatan 2021–2025. Kepercayaan publik kembali ia peroleh

dalam Pilkada 2024, yang mengantarkannya melanjutkan kepemimpinan di periode kedua, 2025–2030.

Fitroh menambahkan, OIT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan. “Mutasi dan promosi jabatan,” kata Wakil Ketua KPK

Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Jumat (7/11).

Fitroh belum bisa berbicara banyak mengenai kasus yang sedang ditangani, pihak-pihak yang tertangkap tangan, serta barang bukti yang berhasil disita dari operasi senyap tersebut.

### *Sambungan hal. 1*

Berdasarkan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasi kepada Bupati Blitar untuk memerintahkan:

1. Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi dengan:

a. PLN untuk melakukan rekonsiliasi atas tagian listrik yang tidak sesuai tarif sebesar Rp.279.363.663,00

b. Dinas PUPR untuk memproses mutasi asset jaringan listrik dan mengidentifikasi titik abonemen

yang tidak mempunyai jaringan lampu PJU dan mengajukan penghentian atas titik abonemen dimaksud pada PLN; dan

2. Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk memproses pemulihan kelebihan bayar dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 396.094.574,- Untuk mengetahui kelemahan, ketidakpatuhan dan rekomendasi perbaikan secara terperinci, ikuti terus laporan Khusus Redaksi BIDIK NASIONAL edisi mendatang, *(Toddy/Lipsus)*

### *Sambungan hal. 1*

Wunut, detail lokasi kegiatan pembangunan, data program pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wunut?

Bahwa untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui informasi yang tepat, akurat, dan benar atas penerimaan, pengalokasian, dan penggunaan Dana Desa Wunut. Redaksi BIDIK NASIONAL secara resmi telah mengajukan konfirmasi melalui surat nomor 080/210/KONF.LP/X/RED-BN pada, Jum’at 31 Oktober 2025. Namun hingga, Jum’at 7 November 2025 belum mendapat respon jawaban dari Pemerintah Desa Wunut.

Redaksi BIDIK NASIONAL juga belum memperoleh salinan Informasi, data dan/atau dokumen penerimaan, pengalokasian dan penggunaan Dana Desa Wunut Tahun 2024. Hak jawab dan klarifikasi Desa Wunut bisa disampaikan ke redaksi BN 08123209649 atau email: [bidiknasional@yahoo.com](mailto:bidiknasional@yahoo.com).

*(Toddy/Lipsus)*

### *Sambungan hal. 1*

Ketika BN tanyakan dimana bangunan Climbing itu di dirikan, “Di kompleks Lapangan Tennis,” ungkapnya. Ketika BN bertanya apakah di lokasi kebon rojo?, “Ya,” kata Bambang. Tetapi ketika BN investigasi di Taman Kebon rojo tidak ditemukan bangunan Climbing tersebut.Sampai saat ini BN masih belum mengetahui bangunan Climbing itu didirikan dimana.

Jika dicermati pada pengadaan barang Climbing Wall Speed, ada indikasi kurang beres dan tidak transparan. Ada dugaan bahwa pada pengadaan Climbing tersebut diduga dilakukan seperti “Siluman” diduga tidak transparan. Apalagi PPK (Kadisporapar), tidak mau menunjukkan siapa identitas penyedia jasa (pemenang tender) identitas pemenang pada pengadaan yang dilakukan di Disporapar Jombang tersebut.

Sementara menurut salah satu aktifis LSM Sapujagad, Rachman Alim, “Alasan tidak tahu yang di ungkapkan PPK yang juga sebagai Kepala Dinas Disporapar Jombang, justru dapat menjadi indikasi adanya penyelewengan, terutama jika di sertai dengan bukti adanya kerugian negara atau persekongkolan,” ujarnya.

Sama halnya PPK mengindikasikan menciptakan lingkungan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi. *(Tok)*

### *Sambungan hal. 6*

tidak berperilaku binal,agar tidak liar dan tidak terjerumus pada kantong-kantong narkoba serta pergaulan seks bebas,” harapnya.

Sementara kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Pamekasan Moh. Alwi S.sos, Msi menyampaikan, pagelaran festival musik daul ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari

jadi Pamekasan ke-495 yang di selenggarakan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan, sehingga dengan adanya kegiatan itu menjadi bentuk pelayanan terhadap aksi musik masyarakat untuk pelestarian musik daul, “Tujan dari kegiatan ini merupakan persiapan dari rangkaian untuk memajukan musik daul di kab Pamekasan,” pungkasnya.*(adv/kholis)*

### *Sambungan hal 6*

penuh cinta,” ungkapnya.

Selain itu,bupati Pamekasan Dr KH. Kholilurrahman, SH. Msi mengajak kepada semua elemen masyarakat di pamekasan pada momentum peringatan hari jadi Pamekasan ke 495 tahun 2025 agar di jadikan sebagai pemantik, semangat serta memperkokoh persatuan bergotong royong dan menjaga keharmonisan. “Kalau kita harmonis, insyaallah kita punya semangat untuk membangun pamekasan yang lebih baik.mari kita bangkit bersama untuk Pamekasan maju,” pungkasnya.

Sementara dalam sambutannya menurut perwakilan dari Kementerian Kebudayaan RI Samsul Hadi, SH, MM menyampaikan pada puncak perayaan peringatan hari jadi Pamekasan ke 495 tahun 2025 yang bertajuk se malam di Madura bukan hanya dijadikan sekedar kegiatan seremonial belaka, melainkan menjadi momentum untuk meneguhkan jati diri semangat kebersamaan, komitmen kita dalam membangun daerah yang berakar kuat dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang di miliki. “Tentunya, kementerian kebudayaan memberikan penghargaan dan mengapresiasi sekali kegiatan puncak perayaan se malam di madura ini,” ucapnya.

*(kholis)*

## Sambungan hal 1 Dusun Setia ...

### *Sambungan hal 10*

Dia menyerahkan ke Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan tersebut.

Berdasarkan pemberitaan media massa, Sugiri Sancoko baru saja melantik 138 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Ponorogo, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Jumat. Ratusan pejabat ini menduduki posisi strategis. *(red/kompas.com, cnn)*

## Ketua MA ...

Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Tata Usaha Negara dan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI.

Dalam Pembinaan Teknis Yudisial Panitera Pengadilan seluruh Indonesia tersebut, dihadiri juga oleh para Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Dalam sambutannya, Prof.Sunarto menyampaikan, agar Pembinaan para Panitera Pengadilan Seluruh Indonesia guna meningkatkan Integritas, Profesionalitas dan rasa memiliki terhadap Lembaga Peradilan.

Rasa memiliki Lembaga, memberikan Dampak Positif dalam melaksanakan Tugas bukan juga hanya sebatas melaksanakan Kewajiban, melainkan adanya rasa Kebanggaan sebagai insan Peradilan, sehingga menjadi Sumber Semangat untuk bekerja dengan Hati, Berintegritas dan memberikan yang terbaik bagi Lembaga Peradilan,” ungkap Ketua Mahkamah Agung RI.

Mantan Kepala Badan Pengawasan MA RI, juga mengajak para Panitera Pengadilan Seluruh Indonesia, untuk menginstropeksi diri, apakah sebagai insan Peradilan telah memberikan yang terbaik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Peradilan?

Hal ini dikarenakan, setiap jabatan yang diamanahkan terhadap insan Peradilan, karena terdapat harapan masyarakat atas pelaksanaan Peradilan yang berintegritas dan profesional.

Oleh sebab itu Mahkamah Agung RI, hingga saat ini dapat Berdiri Tegak tidak terlepas dari seluruh peran Aparatur Peradilan. Sebagai sebuah Organisasi, diperlukan juga Evaluasi setiap insan Mahkamah Agung RI yang berada di dalamnya, agar seluruh Pelaksanaan Tugas dan juga Fungsi Peradilan, dapat berjalan dengan tujuan, yakni tegaknya Hukum dan Keadilan dari Ruang Sidang Pengadilan,” ujar Ketua Mahkamah Agung RI lagi.

Profesor Hukum Universitaas Airlangga tersebut juga menyampaikan, bahwa dalam rangka menguatkan Peran, Fungsi dan juga Menjaga Integritas Panitera, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti di seluruh Indonesia.

Para Pimpinan Mahkamah Agung RI, akan terus berupaya meningkatkan Kesejahteraan para Panitera, Juru Sita dan Juru Sita Pengadilan, di mana telah disampaikan Surat Ketua Mahkamah Agung RI terkait Perubahan Rancangan Peraturan Presiden, Perubahan Tunjangan Panitera dan Juru Sita/Juru Sita Pengadilan kepada Lembaga Eksekutif.

Oleh sebab itu, besar harapan Ketua Mahkamah Agung RI kepada Panitera Pengadilan Seluruh Indonesia dapat Bertransformasi menyesuaikan Perkembangan Revolusi Industri 5.0, dengan tetap Menjaga Integritas dan Akuntabilitas Kinerja. *(AKariem)*

## Dinas Pertanian Subang ...

### *Sambungan hal 1*

Informasi yang diterima dari sumber internal Dinas Pertanian menyebutkan bahwa pada tahun 2022 terdapat penyaluran 10 unit Combine Harvester Maxi Bimo 110 yang tersebar di enam kecamatan. Program tersebut merupakan hasil aspirasi anggota DPR RI Dapil IX melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sumber itu juga menyebut nama Nana Supriatna, yang saat itu menjabat Kabid Penyuluh dan Sumber Daya (PSD) dan kini menjabat Kabid Hortikultura, diduga ikut terlibat dalam pelaksanaan program bantuan tersebut.

Sejumlah kelompok tani penerima bantuan mengaku dimintai pungutan sebesar Rp50 juta per unit, yang diduga dilakukan oleh oknum di lingkungan dinas. Meski demikian, keterangan tersebut masih perlu dikonfirmasi secara resmi oleh pihak Dinas Pertanian dan aparat penegak hukum.

Pada tahun 2025, Dinas Pertanian Subang kembali menerima bantuan dari Kementerian Pertanian RI berupa tiga unit Combine Harvester RG 118 (Inari) dan satu unit Harpia. Namun hasil investigasi lapangan tim Media Bidik Nasional menemukan adanya indikasi pungutan serupa, dengan nominal sekitar Rp50 juta per unit, yang diduga melibatkan oknum berinisial S.S., menjabat sebagai Kabid Tanaman Pangan.

Selain itu, satu unit Combine Harvester yang sebelumnya tercatat sebagai milik Brigade Dinas Pertanian diduga telah berpindah tangan ke salah satu pengusaha pertanian sekaligus pengelola Gapoktan/UPJA Ciasem Makmur.

Sebagaimana diketahui, bantuan Alsintan dari pemerintah pusat tidak diperbolehkan dikenai pungutan dalam bentuk apa pun. Seluruh bantuan disalurkan secara gratis kepada kelompok tani penerima, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produksi dan efisiensi pertanian.

Dengan demikian, segala bentuk pungutan di luar ketentuan resmi berpotensi melanggar hukum, termasuk kategori penyalahgunaan wewenang atau pungli, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Peraturan Presiden tentang Pelayanan Publik. Aparat penegak hukum harus tanggap mengusut dugaan korupsi ini.

Tim Media Bidik Nasional akan terus melakukan verifikasi silang dan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Subang, Polres Subang, serta Kejaksaan Negeri Subang, guna memastikan kejelasan distribusi bantuan Alsintan dan mengungkap dugaan keterlibatan oknum-oknum di lapangan.

Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2022 jabatan Kepala Dinas Pertanian Subang dijabat oleh Dra. Nenden Setiawati, M.Si., yang kini telah berpindah tugas sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Subang, berdasarkan keputusan pelantikan Bupati Subang tanggal 5 Agustus 2024.

Sebagai media yang berpegang pada prinsip kode etik jurnalistik dan asas “cover both sides”, Media Bidik Nasional menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses klarifikasi resmi dari pihak Dinas Pertanian Subang.

Publik berhak mengetahui kejelasan dan transparansi pengelolaan bantuan pertanian agar program pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran, bebas pungli, dan bersih dari penyimpangan. *(M.tohir/tim)*

## Dugaan Pungli ...

### *Sambungan hal 1*

mendapat pemberitahuan resmi terkait sumbangan tersebut. “Banyak wali murid yang kaget dan keberatan dengan adanya sumbangan ini. Kesannya seperti SPP, padahal ini sekolah negeri,” tambahnya.

Video itu pun memicu beragam tanggapan dari warganet, terutama karena menyangkut praktik pungutan di sekolah negeri yang seharusnya gratis dalam hal biaya operasional dasar.

Menanggapi hal itu, pihak SMA Negeri 1 Kauman Agus Sugiarto selaku Kepala Sekolah menegaskan bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun kepada siswa. Menurutnya, yang dimaksud adalah sumbangan sukarela dari komite sekolah, bukan kewajiban yang harus dibayar setiap bulan.

“Namanya sumbangan itu bersifat sukarela. Siapa yang ingin nyumbang, diterima. Siapa yang tidak ingin menyumbang, juga tidak masalah. Tidak ada paksaan dan tidak ada konsekuensi bagi siswa yang tidak menyumbang,” jelas Agus Jumat (31/10).

Intinya tidak ada tarikan atau pungutan, yang ada itu sumbangan sukarela untuk peningkatan mutu dari wali murid melalui komite sekolah yg masing-masing sudah disepakati oleh wali murid, jadi tidak ada paksaan apalagi ada sanksi ke siswa jika tidak menyumbang, menyumbang kita Terima tidak nyumbang juga tidak apa2.. Tidak menyumbang tidak ada konsekuensi apapun terhadap kegiatan pembelajaran siswa tegasnya. *(Nyoto)*

# Gubernur Khofifah Raih Penghargaan DPD RI Awards 2025

## □ Mempertegas Jatim Provinsi Ramah Anak dan Perempuan

SURABAYA, BN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan DPD RI Awards 2025 untuk kategori Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang DPD RI Awards 2025 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi nyata Gubernur Khofifah dalam mewujudkan tata kelola perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan yang progresif.

PENGHARGAAN yang diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi kepada Gubernur Khofifah yang diwakili Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di The Tribra Hotel & Convention Center, Dharmawangsa Jakarta, Selasa (28/10).

DPD RI menilai Gubernur Khofifah memiliki komitmen kuat dalam memperluas akses perlindungan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong kemandirian sosial dan ekonomi

perempuan di berbagai daerah di Jawa Timur.

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini memperkuat posisi Jatim sebagai provinsi yang aktif mendorong tata kelola daerah yang berpihak pada anak, sekaligus mempertegas Jatim sebagai provinsi yang ramah bagi anak dan perempuan.

"Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja

keras seluruh elemen di Jawa Timur yang terus berkomitmen memperkuat perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Ini adalah hasil sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan," ujar Khofifah di Surabaya, Rabu (29/10).

Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, sejak tahun 2021 telah mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Dan berhasil mempertahankan predikat Provila secara berkelanjutan melalui koordinasi dengan kabupaten/kota dan berbagai program perlindungan anak.

Bahkan di tahun 2025, untuk kesekian kalinya pemerintah pusat kembali menganugerahkan penghar-

gan Provila kepada Jatim sebagai pengakuan atas upaya memobilisasi daerahnya menuju lingkungan yang layak anak.

Tak hanya itu saja, di tingkat kota/kabupaten, sejumlah daerah di Jatim juga telah meraih predikat KLA kategori Utama, Nindya maupun Madya dan sudah tidak ada lagi yang berada di tingkat Pratama. Secara rinci, KLA di Jatim meliputi 6 kabupaten/kota menduduki peringkat utama, 14 kabupaten/kota menduduki peringkat nindya, 18 kabupaten/kota menduduki peringkat madya.

"Memang sejak awal isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan merupakan prioritas utama dalam pembangunan sosial di bumi Majapahit," katanya.

"38 kabupaten/kota di

Jawa Timur seluruhnya telah masuk dalam pemeringkatan KLA. Bahkan sebagian daerah berhasil meningkatkan peringkat KLA," tambahnya.

Khofifah menegaskan bahwa komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan struktural, tetapi juga melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan anak dan perempuan.

Salah satunya yakni penerapan program MPLS RAMAH (Ramah, Edukatif, Inklusif, Partisipatif, dan Adaptif) yang menekankan lingkungan sekolah aman kekerasan dan kampanye anti-perundungan. Program ini sekaligus menguatkan literasi digital pelajar untuk mencegah risiko kekerasan berbasis siber.

"Saya selalu tegaskan kepada seluruh kepala daerah



Khofifah saat berada ditengah anak-anak dalam suatu acara. (foto: ilustrasi)

agar anak-anak memiliki ruang bermain yang aman, pelayanan kesehatan terpadu untuk balita, sekolah yang anti-bullying, dan mekanisme perlindungan anak yang responsif," katanya.

Terkait pemberdayaan perempuan, Khofifah menekankan pentingnya memperluas partisipasi perempuan

dalam ekonomi produktif melalui wirausaha, pelatihan vokasi, dan penguatan kelompok usaha perempuan.

"Begitu juga terkait pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang kesetaraan, tapi juga tentang memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga," pungkasnya. (dji)

## Gubernur Jatim Pimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi



Kapolda Jatim, Gubernur Jatim dan para pejabat lainnya saat mengikuti upacara Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi. (istimewa)

SURABAYA, BN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Wilayah Jawa Timur yang digelar di Lapangan Upacara Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (5/11).

Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang

Avianto dan dihadiri oleh Kapoksahli Pangdam V/Brawijaya Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto, dan jajaran Forkopimda Jawa Timur.

Kapolda Jawa Timur Nanang Avianto menyampaikan Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Wilayah Jawa Timur dilakukan serentak se Indonesia. Adapun

tujuan dari apel kesiapan ini, lanjutnya, adalah pengecekan mulai dari SDM hingga peralatan.

"Kita cek kembali dari mulai awak personel atau Sumber Daya Manusia, kemudian peralatan. Ini harus benar-benar siap karena dari kemarin mulai ada perubahan iklim musim kemarau

ke musim hujan," kata Nanang.

"Beberapa kali juga terjadi bencana, dan inipun sudah mendekati puncaknya. Sehingga kesiapan kita harus benar-benar siap untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan," tambahnya.

Nanang menambahkan, pentingnya kolaborasi baik dengan Pemerintah Daerah, TNI, BNPB bahkan stakeholder terkait termasuk masyarakat dilibatkan. Di Polda Jatim, imbuhnya, terdapat 1.400 personel gabungan yang mengikuti Apel, serta dilakukan serentak oleh jajaran Poldas maupun Polres yang diikuti 6.000 personel.

"Paling tidak kita sudah mempersiapkan diri dan selalu mengevaluasi kejadian sebelumnya. Supaya ada perbaikan dalam kegiatan pelayanan terhadap penanggulangan bencana. Kita pastikan melakukan dengan cepat dan tepat karena ini berkaitan pertolongan pada jiwa," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengajak seluruh stakeholder Jawa Timur membangun kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi di puncak musim hujan. Dengan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor diharapkan bisa meminimalisir risiko bencana yang terjadi. "Apel ini jadi wujud nyata, langkah antisipasi bersama meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi," kata Gubernur Khofifah.

"Puncak musim hujan sudah depan mata. Maka, kita ingin mengajak seluruh pihak untuk ikut berkontribusi aktif menghadapi potensi bencana hidrometeorologi," imbuhnya.

Wilayah Jawa Timur, lanjut Khofifah, pada November hingga awal tahun 2026 berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, longsor, gelombang tinggi hingga angin kencang yang kerap kali terjadi saat musim penghujan.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyebut, apel ini digelar serentak di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota Jawa Timur. Oleh karenanya, dirinya menginstruksikan seluruh pihak untuk terus meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

"Lewat apel ini kita juga ingin personel maupun sarana prasarana peralatan penanggulangan bencana siap siaga mengantisipasi situasi darurat di wilayah Jawa Timur," lanjutnya.

"Kita meyakini kolaborasi mulai unsur Poldas Jatim, TNI, BPBD hingga Basarnas sebagai salah satu kunci melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak yang mungkin terjadi," imbuhnya.

Di akhir, Gubernur Khofifah berharap agar langkah penanganan bencana yang terukur agar pencegahan bencana dapat dilakukan dan bisa membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan maksimal. (dji)

## Ketua MA RI Ingatkan Jaga Integritas dan Tingkatkan Profesionalisme Kinerja Badan Peradilan

JAKARTA, BN - Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Teknis Yudisial Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang berlangsung di Balai Rung Mahkamah Agung RI (MARI) dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, SH, MH pada Jumat (31/10/2025).

Dalam rangka memastikan Layanan, Tugas dan Fungsi Teknis Pengadilan berjalan secara Transparan, Akuntabel dan Profesional.

Mahkamah Agung RI melakukan Pembinaan Teknis Yudisial kepada seluruh Panitera Tingkat Banding dan Pertama pada Empat Lingkungan Badan Peradilan di seluruh Indonesia, pada Jumat (31/10/2025) yang lalu.

Dalam kegiatan tersebut, Prof. Sunarto didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Kamar Pengawasan, Ketua Kamar Pidana,

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Ketua MA RI, Prof. Dr. Sunarto, SH, MH (baju batik merah, tengah) memaparkan pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Teknis Yudisial kepada para peserta di MA. (Ist)

## Bidang SDA Dinas PUPR Magetan Rehab Bendungan dan Saluran Genggong

MAGETAN, BN - Tembok pengaman Bendungan ataupun Dam sangat berpengaruh terjadinya penggerusan atau pengikisan tanah sehingga menimbulkan erosi yang bisa berakibat fatal bagi tanaman dan bangunan sekitarnya bila hal itu terjadi.

Tembok pengaman Bendungan Genggong di desa Randugede Kecamatan Paosan Kabupaten Magetan kondisinya mengkhawatirkan, jika ambruk bisa dapat merobohkan bangunan dua rumah yang dekat dengan bendungan tersebut.

Sebelum hal itu terjadi, dua keluarga melapor ke pihak pemerintah desa setempat dan kemudian diresponnya dan Alhamdulillah tahun 2025 telah mulai dikerjakan rehab tembok pengaman Bendungan Genggong oleh Dinas PUPR Bidang SDA (Sumber Daya Air) Magetan dan mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Kunzani lurah desa Randugede dan pemerintah kabupaten via Dinas PUPR Bidang SDA Magetan.

Di tempat terpisah, Kunzani menjelaskan bahwa, Dam



Bendungan Genggong di desa Randugede Kecamatan Paosan Kabupaten Magetan sedang direhab. (ashar)

Genggong untuk tebing nya sudah parah dan dikuatkan bila tidak cepat teratasi maka tanah tersebut akan menggerus dan mengakibatkan rumah Suratno dan Juremi akan longsor.

"Awal mula kami usul kan ke UPTD Gandong 2 kemudian kami usulkan ke SDA Dinas PUPR Magetan dan usulan kami disetujui dan sekarang ini lagi dikerjakan," ujar Kunzani

Lanjut Kunzani pula, saya atas nama lurah Randugede mewakili masyarakat desa, pribadi dan khususnya 2 warga yaitu Suratno dan Juremi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Magetan dan Bidang SDA Dinas PUPR Magetan yang telah merespon dan kini sudah di mulai kerjakan.

Pengerjaan Rehabilitasi Bendungan dan Saluran Genggong di desa Randugede dengan anggaran sebesar Rp. 174.148.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender yang dikerjakan oleh

Arif sebagai tenaga pelaksana kontraktor pelaksana CV. Zafran itu mengatakan, tahap awal melakukan pembersihan area paling tidak memerlukan waktu dan tepat tanggal 17 Oktober 2025 mulai pelaksanaan pengerjaan dan kami berusaha semaksimal mungkin selesai dengan waktu 90 hari kalender sesuai dengan kontrak dan tetapi kami berusaha keras sebelum 90 hari sudah selesai.

"Musim hujan merupakan satu kendala juga selain area proyek yang dikerjakan namun kendala itu menjadikan kami semakin semangat untuk menyelesaikan hingga waktu nya sesuai dengan RAB dan spesifikasi yang ada. Oh ya kami pun soal material pasir dan krikil serta batu kami tidak main-main dengan ketentuan yang sudah tertulis dan apa lagi pihak dari SDA Dinas PUPR Magetan sangat tegas apa bila sesuai suruh ganti, kenapa sampai begitu ?, karena akan mempengaruhi kualitas bangunan nya, mas," ujar Arif.

Ulin dari SDA saat ditemui mengutarakan, memang kami sangat tegas dalam hal ketentuan material yang ada dan kontraktor pelaksana wajib menyerahkan contoh pasir, krikil dan batu ke kantor SDA, sehingga pihak SDA bisa mengetahui setelah diteliti sudah sesuai atau tidak terhadap material itu dengan spesifikasi.

"Pihak SDA walaupun sudah ada konsultan pengawas tetap melakukan monitoring ke lokasi agar dari pihak kami bisa memastikan kualitas dan progres pelaksanaan sesuai dengan perencanaan," kata Ulin.

(Adv/Ashar)